



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

LAPORAN KINERJA

ESELON III
TRIWULAN I - 2026

Jl. Jend Hariyono No 160, Lumajang

 @satpolplumajang

 082141461213



**LAPORAN KINERJA PEJABAT ESELON III
TRIWULAN I TAHUN 2026
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

NAMA : AGUNG KUNCORO WICAKSONO, S.Si
NIP : 19840330 200903 1 004
PANGKAT : PEMBINA
GOLONGAN : IV/a
JABATAN : SEKRETARIS

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2026 pada Triwulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan atas pencapaian kinerja Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja yang mendasari Peraturan Bupati nomor 43 tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.

1.1 TUGAS POKOK

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan
- b. Memberikan pelayanan teknis administrasi dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang

1.2 FUNGSI

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Sekretaris satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja ;
2. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program anggaran dan perundang-undangan ;

3. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerja sama dan hubungan masyarakat ;
4. Pengelolaan urusan rumah tangga ;
5. Pengelolaan administrasi dan kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai ;
6. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran ;
7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern
8. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas
9. Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana
10. Pengelolaan barang milik /kekayaan daerah

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang ditandatangani antara Sekretaris dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja
Sekretaris

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %

Sekretaris mengampu sasaran program dan anggaran kegiatan. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki sasaran Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor, dengan indikator kinerja Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran dan target sebesar 100%. Penjelasan terkait capaian kinerja dan anggaran akan dipaparkan pada sub bab pengukuran kinerja.

2.2 PENGUKURAN KINERJA

• **CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026**

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Sekretaris
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Ket
			Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)
1	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %	31%,	31%	

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa target indikator Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran tahun 2026 sebesar 100%, dengan realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 31%. Capaian kinerja sampai dengan triwulan I sebesar 31%. Hal ini dikarenakan beberapa kegiatan dan sub kegiatan akan dilakukan pada triwulan berikutnya, selain itu penyediaan jasa pengiriman surat menyurat tidak terealisasi dikarenakan belum ada surat dan berkas yang membutuhkan jasa pengiriman. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3 Fasilitasi Kebutuhan Operasional Kantor sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran yang dapat direncanakan			Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran yang dipenuhi		
URAIAN		RENCANA	URAIAN		REAL
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	
Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Penyusunan Dokumen Renja	1		Penyusunan Dokumen Renja	
	Penyusunan Dokumen P Renja	1		Penyusunan Dokumen P Renja	
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
	Penyusunan Dokumen RKA	1		Penyusunan Dokumen RKA	
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Penyusunan Laporan Kinerja (LKj TW 1-4, dan LKjIP)	4		Penyusunan Laporan Kinerja (LKj TW 1-4, dan LKjIP)	1
Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Pembayaran Gaji dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN Bulan Januari s/d Desember	1		Pembayaran Gaji dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN Bulan Januari s/d Desember	1
Sub Kegiatan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Sub Kegiatan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	

Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran yang dapat direncanakan			Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran yang dipenuhi		
URAIAN		RENCANA	URAIAN		REAL
	Pembayaran honor pengelola keuangan	1		Pembayaran honor pengelola keuangan	1
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (LO, LRA, Neraca, LPE, CALK)	1		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (LO, LRA, Neraca, LPE, CALK)	1
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SKPD		Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SKPD	
	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	1		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	1
Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	Penyediaan alat listrik dan penerangan Bangunan Kantor	1		Penyediaan alat listrik dan penerangan Bangunan Kantor	1
Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
	Pengadaan ATK	1		Pengadaan ATK	1
	Pengadaan Benda POS	1		Pengadaan Benda POS	1
	Pengadaan alat kebersihan dan bahan pembersih	1		Pengadaan alat kebersihan dan bahan pembersih	1
Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
	Penyediaan Barang Cetakan	1		Penyediaan Barang Cetakan	
	Penggandaan Dokumen	4		Penggandaan Dokumen	1
Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	perjalanan dinas luar kota	4		perjalanan dinas luar kota	1
Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Penyediaan jasa kirim laporan Surat	1		Penyediaan jasa kirim laporan Surat	
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	penyediaan jasa air Bulan Januari s/d Desember	1		penyediaan jasa air Bulan Januari s/d Desember	1

Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran yang dapat direncanakan			Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran yang dipenuhi		
URAIAN		RENCANA	URAIAN		REAL
	penyediaan jasa listrik Bulan Januari s/d Desember	1		penyediaan jasa listrik Bulan Januari s/d Desember	1
	penyediaan jasa telepon Bulan Januari s/d Desember	1		penyediaan jasa telepon Bulan Januari s/d Desember	1
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	penyediaan upah PPPK PW	1		penyediaan upah PPPK PW	1
	Pembayaran Upah Outsourcing	1		Pembayaran Upah Outsourcing	1
	Pembayaran retribusi sampah	1		Pembayaran retribusi sampah	1
	Penyediaan jasa jaminan asuransi	1		Penyediaan jasa jaminan asuransi	1
Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	Pemeliharaan rutin Kendaraan operasional	12		Pemeliharaan rutin Kendaraan operasional	2
	Pemeliharaan rutin Kendaraan operasional roda 2	30		Pemeliharaan rutin Kendaraan operasional roda 2	3
Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Pemeliharaan alat kantor (AC)	8		Pemeliharaan alat kantor (AC)	3
	Pemeliharaan alat studio (HT)	38		Pemeliharaan alat studio (HT)	10
	Pemeliharaan komputer dan printer	18		Pemeliharaan komputer dan printer	7
	JUMLAH	138		JUMLAH	43

Formulasi perhitungannya adalah:

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran} \\
 & = \frac{\text{Jumlah Fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi}}{\text{Jumlah Fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang direncanakan}} \times 100 \\
 & = \frac{43}{138} \times 100 \\
 & = 31\%
 \end{aligned}$$

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan I Tahun 2026:

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Sekretaris
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Rencana Aksi

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Ket
			Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)
1	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %	98%	98%	

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa target indikator Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran pada triwulan I tahun 2026 sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 98%. Capaian kinerja pada triwulan I sebesar 98%, Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.5 Fasilitasi Kebutuhan Operasional Kantor pada Triwulan I Tahun 2026

Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran yang dapat direncanakan			Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran yang dipenuhi		
URAIAN		RENCA NA	URAIAN		REA L
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	
Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Penyusunan Dokumen Renja			Penyusunan Dokumen Renja	
	Penyusunan Dokumen P Renja			Penyusunan Dokumen P Renja	
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
	Penyusunan Dokumen RKA			Penyusunan Dokumen RKA	
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Penyusunan Laporan Kinerja (LKj TW 1-4, dan LKjIP)	1		Penyusunan Laporan Kinerja (LKj TW 1-4, dan LKjIP)	1
Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran yang dapat direncanakan			Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran yang dipenuhi		
URAIAN		RENCA NA	URAIAN		REA L
Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1
	Pembayaran Gaji dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN Bulan Januari s/d Desember			Pembayaran Gaji dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN Bulan Januari s/d Desember	
Sub Kegiatan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Sub Kegiatan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
	Pembayaran honor pengelola keuangan	1		Pembayaran honor pengelola keuangan	1
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (LO, LRA, Neraca, LPE, CALK)	1		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (LO, LRA, Neraca, LPE, CALK)	1
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SKPD		Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SKPD	
	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1
Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	Penyediaan alat listrik dan penerangan Bangunan Kantor	1		Penyediaan alat listrik dan penerangan Bangunan Kantor	1
Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
	Pengadaan ATK	1		Pengadaan ATK	1
	Pengadaan Benda POS	1		Pengadaan Benda POS	1
	Pengadaan alat kebersihan dan bahan pembersih	1		Pengadaan alat kebersihan dan bahan pembersih	1
Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	Penyediaan Barang Cetak	1		Penyediaan Barang Cetak	1
	Penggandaan Dokumen	1		Penggandaan Dokumen	1
Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	perjalanan dinas luar kota	1		perjalanan dinas luar kota	1
Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran yang dapat direncanakan			Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran yang dipenuhi		
URAIAN		RENCA NA	URAIAN		REA L
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Penyediaan jasa kirim laporan Surat			Penyediaan jasa kirim laporan Surat	
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	penyediaan jasa air Bulan Januari s/d Maret	1		penyediaan jasa air Bulan Januari s/d Maret	1
	penyediaan jasa listrik Bulan Januari s/d Maret	1		penyediaan jasa listrik Bulan Januari s/d Maret	1
	penyediaan jasa telepon Bulan Januari s/d Maret	1		penyediaan jasa telepon Bulan Januari s/d Maret	1
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	penyediaan upah PPPK PW	1		penyediaan upah PPPK PW	1
	Pembayaran Upah Outsorching	1		Pembayaran Upah Outsorching	1
	Pembayaran retribusi sampah	1		Pembayaran retribusi sampah	1
	Penyediaan jasa jaminan asuransi	1		Penyediaan jasa jaminan asuransi	1
Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	Pemeliharaan rutin Kendaraan operasional	5		Pemeliharaan rutin Kendaraan operasional	5
	Pemeliharaan rutin Kendaraan operasional roda 2	20		Pemeliharaan rutin Kendaraan operasional roda 2	20
Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Pemeliharaan alat kantor (AC)	3		Pemeliharaan alat kantor (AC)	3
	Pemeliharaan alat studio (HT)	10		Pemeliharaan alat studio (HT)	10
	Pemeliharaan komputer dan printer	7		Pemeliharaan komputer dan printer	7
	JUMLAH	65		JUMLAH	64

Formulasi perhitungannya adalah:

$$\begin{aligned} \text{Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran} &= \frac{\text{Jumlah Fasilitas kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi}}{\text{Jumlah Fasilitas kebutuhan operasional kantor yang direncanakan}} \times 100 \\ &= \frac{64}{65} \times 100 \\ &= 98\% \end{aligned}$$

Tabel 2.6 Cost per Outcome Sekretaris Tahun 2026 – sampai dengan Triwulan I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu (Rp)	Anggaran		Efisiensi
			Target	Realisasi		Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1.	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Fasilitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 %	14,28 %				
2.	Terpenuhiinya fasilitas administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %				
3.	Terpenuhiinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum PD	100 %	53,85 %				
4.	Terpenuhiinya fasilitas Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	100 %	87,5 %				
5.	Terpenuhiinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Pemeliharaan BMD	100 %	23,58 %				

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Rp 12.046.250,00	Rp 0,00	0%	0
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Rp 6.363.560.711,00	Rp 1.242.509.381,00	19,52 %	80,48
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Rp 99.268.056,00	Rp 52.510.399,00	52,89 %	0,96
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Rp 781.984.286,00	Rp 147.595.568,00	18,87 %	6,13
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Rp 540.477.716,00	Rp 58.821.830,00	10,88 %	12,7

Tabel 2.7 Cost per Outcome Sekretaris Tahun 2026 – pada Triwulan I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja		%	Anggaran			Efisiensi	
			Target	Realisasi		Pagu (Rp)	Realisasi	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)	
1	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Fasilitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	14,28 %	14,28 %	100 %					
2	Terpenuhinya fasilitas administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %					
3	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum PD	53,85 %	53,85 %	100 %					
4.	Terpenuhinya fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	100 %	87,5 %	87,5 %					
5.	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Pemeliharaan BMD	23,58 %	23,58 %	100 %					
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja					Rp	3.143.000,00	Rp 0,00	0%	0

No	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Kinerja		Pagu (Rp) (7)	Anggaran		Efisiensi (10=6-9)
			Target (4)	Realisasi (5)		% (6=5/4)	Realisasi (8)	
(1)	Perangkat Daerah							
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp 1.831.018.525,00		Rp 1.242.509.381,00	67,85%
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp 70.826.056,00		Rp 52.510.399,00	74,13%
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp 202.509.921,00		Rp 147.595.568,00	72,88%
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 142.928.265,00		Rp 58.821.830,00	41,15%

• **PENYAJIAN DATA KINERJA**

Tabel 2.8 Pengukuran Data Kinerja Sekretaris

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
1.	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Fasilitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	14,28 %	100 %
2.	Terpenuhinya fasilitasi administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100 %	100 %
3.	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum PD	100%	53,85 %	100%
4.	Terpenuhinya fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	100%	87,5 %	87,5%
5.	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Pemeliharaan BMD	100%	23,58 %	100%

1. Target Indikator Persentase Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja sebesar 100%, dengan realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 14,28%. Capaian kinerja sampai dengan triwulan I sebesar 14,28%. Adapun formulasi perhitungannya dapat dilihat berikut ini.

$$\begin{aligned}
 &\text{Persentase Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja} \\
 &= \frac{\text{Jumlah fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dipenuhi}}{\text{jumlah fasilitasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang direncanakan}} \times 100 \\
 &= \frac{1}{7} \times 100 \\
 &= 14,28\%
 \end{aligned}$$

Jumlah fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dipenuhi sampai dengan triwulan I Tahun 2026 sebanyak 1 fasilitasi yakni Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dan LkjIP Tahun 2025, sedangkan Jumlah Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang direncanakan pada Tahun 2026 sebanyak 7 fasilitasi, yakni Penyusunan Renja, P-Renja 2027, RKA 2027, dan Laporan Kinerja Triwulan I-III Tahun 2026. Adapun rekapnya yakni:

Tabel 2.9 Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

Jumlah fasilitasi Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang direncanakan			Jumlah fasilitasi Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang dipenuhi		
URAIAN		RENCANA	URAIAN		REAL
Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Penyusunan Dokumen Renja	1		Penyusunan Dokumen Renja	
	Penyusunan Dokumen P Renja	1		Penyusunan Dokumen P Renja	
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	Penyusunan Dokumen RKA	1		Penyusunan Dokumen RKA	
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Penyusunan Laporan Kinerja (LKj TW 1-4, dan LKjIP)	4		Penyusunan Laporan Kinerja (LKj TW 1-4, dan LKjIP)	1
	JUMLAH	7		JUMLAH	1

2. Target Indikator Persentase Fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar 100%, dengan realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 100%. Capaian kinerja sampai dengan triwulan I sebesar 100%. Adapun formulasi perhitungannya dapat dilihat berikut ini.

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah} &= \frac{\text{Jumlah fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi}}{\text{Jumlah fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan}} \times 100 \\
 &= \frac{4}{4} \times 100 \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Jumlah fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi sampai dengan triwulan I Tahun 2026 sebanyak 4 fasilitasi, sedangkan Jumlah fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan sebanyak 4 fasilitasi. Adapun rekapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.10 Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan			Jumlah fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi		
URAIAN		RENCA NA	URAIAN		RE AL
Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Pembayaran Gaji dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN Bulan Januari s/d Desember	1		Pembayaran Gaji dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN Bulan Januari s/d Desember	1
Sub Kegiatan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Sub Kegiatan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
	Pembayaran honor pengelola keuangan	1		Pembayaran honor pengelola keuangan	1
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (LO, LRA, Neraca, LPE, CALK)	1		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (LO, LRA, Neraca, LPE, CALK)	1
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SKPD		Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SKPD	
	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1
	JUMLAH	4		JUMLAH	4

3. Target Indikator Persentase Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar 100%, dengan realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 53,85%. Capaian kinerja sampai dengan triwulan I sebesar 53,85%. Adapun formulasi perhitungannya dapat dilihat berikut ini.

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah} \\
 & = \frac{\text{Jumlah fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah yang dipenuhi}}{\text{Jumlah fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah yang direncanakan}} \times 100 \\
 & = \frac{7}{13} \times 100 \\
 & = 53,85\%
 \end{aligned}$$

Jumlah fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah yang dipenuhi sampai dengan triwulan I Tahun 2026 sebanyak 7 fasilitasi, sedangkan Jumlah fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah yang direncanakan sebanyak 13 fasilitasi. Adapun rekapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.11 Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah

Jumlah Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang direncanakan			Jumlah Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dipenuhi		
URAIAN		RENCANA	URAIAN		REAL
Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	A	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	Penyediaan alat listrik dan penerangan Bangunan Kantor	1		Penyediaan alat listrik dan penerangan Bangunan Kantor	1
Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
	Pengadaan ATK	1		Pengadaan ATK	1
	Pengadaan Benda POS	1		Pengadaan Benda POS	1
	Pengadaan alat kebersihan dan bahan pembersih	1		Pengadaan alat kebersihan dan bahan pembersih	1
Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	Penyediaan Barang Cetak	1		Penyediaan Barang Cetak	1
	Penggandaan Dokumen	4		Penggandaan Dokumen	1
Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

Jumlah Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah yang direncanakan			Jumlah Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dipenuhi		
URAIAN		RENCANA A	URAIAN		REAL
	perjalanan dinas luar kota	4		perjalanan dinas luar kota	1
	JUMLAH	13		JUMLAH	7

4. Target Indikator Persentasae Fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 100%, dengan realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 87,5%. Capaian kinerja sampai dengan triwulan I sebesar 87,5%. Adapun formulasi perhitungannya dapat dilihat berikut ini.

$$\begin{aligned}
 \text{Persentasae Fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah} &= \frac{\text{Jumlah fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi}}{\text{Jumlah fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan}} \times 100 \\
 &= \frac{7}{8} \times 100 \\
 &= 87,5\%
 \end{aligned}$$

Jumlah fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi sampai dengan triwulan I Tahun 2026 sebanyak 7 fasilitas, Sedangkan Jumlah fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan pada Tahun 2026 sebanyak 8 fasilitas. Adapun rekapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.12 Fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat direncanakan			Jumlah Fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi		
URAIAN		RENCANA	URAIAN		REAL
Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Penyediaan jasa kirim laporan Surat	1		Penyediaan jasa kirim laporan Surat	
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

Jumlah Fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat direncanakan			Jumlah Fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi		
URAIAN		RENCANA	URAIAN		REAL
	penyediaan jasa air Bulan Januari s/d Desember	1		penyediaan jasa air Bulan Januari s/d Desember	1
	penyediaan jasa listrik Bulan Januari s/d Desember	1		penyediaan jasa listrik Bulan Januari s/d Desember	1
	penyediaan jasa telepon Bulan Januari s/d Desember	1		penyediaan jasa telepon Bulan Januari s/d Desember	1
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	penyediaan upah PPPK PW	1		penyediaan upah PPPK PW	1
	Pembayaran Upah Outsourcing	1		Pembayaran Upah Outsourcing	1
	Pembayaran retribusi sampah	1		Pembayaran retribusi sampah	1
	Penyediaan jasa jaminan asuransi	1		Penyediaan jasa jaminan asuransi	1
	JUMLAH	8		JUMLAH	7

5. Target Indikator Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebesar 100%, dengan realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 23,58%, Capaian kinerja sampai dengan triwulan I sebesar 23,58%. Adapun formulasi perhitungannya dapat dilihat berikut ini.

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah} &= \frac{\text{Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan}}{\text{Jumlah Barang Milik Daerah yang direncanakan pemeliharaan}} \times 100 \\
 &= \frac{25}{106} \times 100 \\
 &= 23,58\%
 \end{aligned}$$

Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan sampai dengan triwulan I Tahun 2026 sebanyak 25 unit, sedangkan Jumlah Barang Milik Daerah yang direncanakan pemeliharaan pada tahun 2026 sebanyak 106 unit. Adapun rekapnya yakni:

Tabel 2.13 Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat direncanakan			Jumlah fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi		
URAIAN		RENCANA	URAIAN		REAL
Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	Pemeliharaan rutin Kendaraan operasional	12		Pemeliharaan rutin Kendaraan operasional	2
	Pemeliharaan rutin Kendaraan operasional roda 2	30		Pemeliharaan rutin Kendaraan operasional roda 2	3
Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Pemeliharaan alat kantor (AC)	8		Pemeliharaan alat kantor (AC)	3
	Pemeliharaan alat studio (HT)	38		Pemeliharaan alat studio (HT)	10
	Pemeliharaan komputer dan printer	18		Pemeliharaan komputer dan printer	7
	JUMLAH	106		JUMLAH	25

• **EFISIENSI KINERJA**

Tabel 2.14 Efisiensi Kinerja Sekretaris Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		Kinerja			Efisiensi	
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi		%
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1.	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Rp 12.046.250,00	Rp 0,00	0%	100 %	14,28 %	14,28 %	0
2.	Terpenuhiinya fasilitasi administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 6.363.560.711,00	Rp 1.242.509.381,00	19,52%	100 %	100 %	100 %	80,48
3.	Terpenuhiinya fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum PD	Rp 99.268.056,00	Rp 52.510.399,00	52,89%	100 %	53,85 %	53,85 %	0,96
4.	Terpenuhiinya fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	Rp 781.984.286,00	Rp 147.595.568,00	18,87%	100 %	87,5 %	87,5 %	6,13
5.	Terpenuhiinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan BMD	Rp 540.477.716,00	Rp 58.821.830,00	10,88%	100 %	23,58 %	23,58 %	12,7

1. Sasaran: Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - a. Anggaran Plafon sesuai RKA sebesar Rp 12.046.250,00, dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar Rp 0 dan capaian serapan anggaran adalah 0 %.
 - b. Target kinerja sebanyak 100%, dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebanyak 14,28% dan capaian kinerja sebesar 14,28%
 - c. Terjadinya efisiensi sebesar 0, Hal ini dikarenakan aktivitas dilakukan di triwulan selanjutnya
2. Sasaran : Terpenuhinya fasilitasi administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Anggaran Plafon sesuai RKA sebesar Rp 6.363.560.711,00, dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar Rp 1.242.509.381,00. Capaian serapan anggaran sampai dengan Triwulan I adalah 19,52%
 - b. Target kinerja sebanyak 100%, dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebanyak 100% dan capaian kinerja sebesar 100%
 - c. Terjadinya efisiensi sebesar 80,48. Hal ini dikarenakan aktivitas dilakukan secara rutin sesuai *time schedule*
3. Sasaran : Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Anggaran Plafon sesuai RKA sebesar Rp 99.268.056,00, dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar Rp 52.510.399,00 dan capaian serapan anggaran sampai dengan Triwulan I adalah 52,89%
 - b. Target kinerja sebanyak 100%, dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebanyak 53,85% dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 53,85%
 - c. Terjadinya efisiensi sebesar 0,96. Hal ini dikarenakan aktivitas dilakukan secara rutin sesuai *time schedule*
4. Sasaran : Terpenuhinya fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Anggaran Plafon sesuai RKA sebesar Rp 781.984.286,00, dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar Rp 147.595.568,00 dan capaian serapan anggaran adalah 18,87%
 - b. Target kinerja sebanyak 100%, dengan realisasi pada Triwulan I sebanyak 87,5% dan capaian kinerja sebesar 87,5%
 - c. Terjadinya efisiensi sebesar 6,13, Hal ini dikarenakan aktivitas dilakukan secara rutin sesuai *time schedule*

5. Sasaran : Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Anggaran Plafon sesuai RKA sebesar Rp 149.827.429,00, dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar Rp 148.487.078,00 dan capaian serapan anggaran sampai dengan Triwulan I adalah 99,10%
 - b. Target kinerja sebanyak 100%, dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebanyak 100% dan capaian kinerja sebesar 100%
 - c. Terjadinya efisiensi sebesar 0,99.

2.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

• ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

Dalam pencapaian kinerja terdapat faktor pendukung keberhasilan antara lain sebagai berikut :

1. Sinergitas dan kolaborasi secara vertikal dan horizontal yang baik antar staf dalam menjalankan tugas.
2. Efisiensi kinerja dalam kontrol dan penggunaan sarana dan prasarana yang baik sehingga kinerja dapat berjalan optimal dan akuntabel.
3. Adanya pengendalian internal perangkat daerah yang berkesinambungan sehingga kinerja dapat berjalan sesuai SOP.

• ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

Selain faktor pendukung juga terdapat faktor penghambat yang menyebabkan kinerja tidak berjalan maksimal, antara lain :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan tugas.
2. Terbatasnya sumber daya manusia secara kualitatif sehingga kinerja yang dilaksanakan belum maksimal.
3. Kurangnya sinergitas dengan lintas sektor.

• UPAYA/SOLUSI UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM MENCAPAI KINERJA

Dalam mengatasi hambatan yang ada telah berusaha dilakukan upaya untuk mengatasi antara lain :

1. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada demi tercapainya tujuan yang diharapkan.

2. Melakukan upaya pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana sehingga kinerja dapat berjalan secara berkesinambungan.
3. Mengusulkan kebutuhan SDM sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
4. Berupaya secara aktif dalam upaya membangun sinergitas dengan lintas sektor

2.4 RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Sekretaris, adapun tindak lanjut yang harus dilakukan adalah:

1. Melakukan verifikasi update data pegawai secara berkala dalam aplikasi SIMAK dan pemetaan kepegawaian sesuai dengan kualifikasi individu.
2. Meningkatkan sinergitas internal dan eksternal secara aktif agar kinerja dapat berjalan secara optimal.

2.5 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

	Laporan kurang baik
v	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Target dan realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain

BAB III PENUTUP

Dari hasil penghitungan capaian kinerja Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja diatas, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kinerja berdasarkan Perjanjian kinerja yang telah disepakati belum **mencapai target** tahunan yang ditetapkan dikarenakan masih triwulan I. Meskipun begitu, realisasi kinerja pada triwulan I **berhasil mencapai target** yang ditentukan pada Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026. Pada kenyataannya terdapat beberapa kesenjangan dalam penghitungan efisiensi kinerja namun hal tersebut bukan dikarenakan kinerja yang tidak berhasil, melainkan karena hal-hal yang bersifat tidak disengaja.

Demikian LKj Interim Sekretaris. LKj Interim ini sangat penting dan dapat digunakan sebagai media refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada publik (Masyarakat), selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama *stake holder* OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

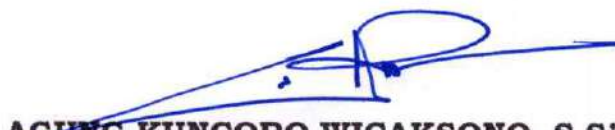
Lumajang, 2 April 2026

Mengetahui,
Atasan langsung
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja



HINDAM ADRI ABADAN, S.IP
NIP. 198807122007011002

Sekretaris



AGUNG KUNCORO WICAKSONO, S.Si
NIP. 19840330 200903 1 004

LAMPIRAN

❖ DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AGUNG KUNCORO WICAKSONO, S.Si**

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HINDAM ADRI ABADAN, S.IP**

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 2 Januari 2026

Pihak Pertama

Pihak Kedua

HINDAM ADRI ABADAN, S.IP
NIP. 19880712 200701 1 002


AGUNG KUNCORO WICAKSONO, S.Si
NIP. 19840330 200903 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SATUAN POLISI PAMOG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG**

No. (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %

No	Kegiatan	Anggaran Rp.	Keterangan
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 12.046.250,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 6.363.560.711,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 99.268.056,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 781.984.286,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 540.477.716	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Total		Rp 7.797.337.019,00	



 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
HINDAM ADRIABADAN, S.IP
 NIP. 19880712 200701 1 002

Lumajang, 2 Januari 2026
 Sekretaris



AGUNG KUNCORO WICAKSONO, S.Si
 NIP. 19840330 200903 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Jenderal Hariyono No. 160, Kelurahan Jogoyudan, Kecamatan Lumajang,
Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur 67316
Telepon (0334) 882613 Faksimile (0334) 882613
Laman satpolpp.lumajangkab.go.id Pos-el : polpp@lumajangkab.go.id

FASILITASI KEBUTUHAN OPERASIONAL PERKANTORAN S/D TRIWULAN I TAHUN 2026

Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran yang dapat direncanakan

PROGRAM	URAIAN	TERENCANAKAN
PROGRAM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	
KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
SUB KEGIATAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Penyusunan Dokumen Renja	1
	Penyusunan Dokumen P Renja	1
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
	Penyusunan Dokumen RKA	1
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	
	Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ TW 1-4, dan LKJIP)	4
KEGIATAN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
SUB KEGIATAN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Pembayaran Gaji dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN Bulan Januari s/d Desember	1
SUB KEGIATAN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
	Pembayaran honor pengelola keuangan	1
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (LO, LRA, Neraca, LPE, CALK)	1
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SKPD	
	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1
KEGIATAN	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
SUB KEGIATAN	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	Penyediaan alat listrik dan penerangan Bangunan Kantor	1
SUB KEGIATAN	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
	Pengadaan ATK	1
	Pengadaan Benda POS	1
	Pengadaan alat kebersihan dan bahan pembersih	1
SUB KEGIATAN	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	Penyediaan Barang Cetak	1
	Penggandaan Dokumen	4
SUB KEGIATAN	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	perjalanan dinas luar kota	4
KEGIATAN	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
SUB KEGIATAN	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Penyediaan jasa kirim laporan Surat	1
SUB KEGIATAN	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	penyediaan jasa air Bulan Januari s/d Desember	1
	penyediaan jasa listrik Bulan Januari s/d Desember	1
	penyediaan jasa telepon Bulan Januari s/d Desember	1
SUB KEGIATAN	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	penyediaan upah PPPK PW	1
	Pembayaran Upah Outsorcing	1
	Pembayaran retribusi sampah	1
	Penyediaan jasa jaminan asuransi	1
KEGIATAN	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran yang dipenuhi

PROGRAM	URAIAN	TERPENUHI
PROGRAM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	
KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
SUB KEGIATAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Penyusunan Dokumen Renja	
	Penyusunan Dokumen P Renja	
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
	Penyusunan Dokumen RKA	
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	
	Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ TW 1-4, dan LKJIP)	1
KEGIATAN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
SUB KEGIATAN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Pembayaran Gaji dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN Bulan Januari s/d Desember	1
SUB KEGIATAN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
	Pembayaran honor pengelola keuangan	1
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (LO, LRA, Neraca, LPE, CALK)	1
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SKPD	
	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1
KEGIATAN	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
SUB KEGIATAN	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	Penyediaan alat listrik dan penerangan Bangunan Kantor	1
SUB KEGIATAN	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
	Pengadaan ATK	1
	Pengadaan Benda POS	1
	Pengadaan alat kebersihan dan bahan pembersih	1
SUB KEGIATAN	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	Penyediaan Barang Cetak	
	Penggandaan Dokumen	1
SUB KEGIATAN	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	perjalanan dinas luar kota	1
KEGIATAN	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
SUB KEGIATAN	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Penyediaan jasa kirim laporan Surat	
SUB KEGIATAN	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	penyediaan jasa air Bulan Januari s/d Desember	1
	penyediaan jasa listrik Bulan Januari s/d Desember	1
	penyediaan jasa telepon Bulan Januari s/d Desember	1
SUB KEGIATAN	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	penyediaan upah PPPK PW	1
	Pembayaran Upah Outsorcing	1
	Pembayaran retribusi sampah	1
	Penyediaan jasa jaminan asuransi	1
KEGIATAN	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	


URAIAN		TERENCANAKAN
SUB KEGIATAN	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	Pemeliharaan rutin Kendaraan operasional	12
	Pemeliharaan rutin Kendaraan operasional roda 2	30
SUB KEGIATAN	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Pemeliharaan alat kantor (AC)	8
	Pemeliharaan alat studio (HT)	38
	Pemeliharaan komputer dan printer	18
	JUMLAH	138

URAIAN		TERPENUHI
SUB KEGIATAN	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	Pemeliharaan rutin Kendaraan operasional	2
	Pemeliharaan rutin Kendaraan operasional roda 2	3
SUB KEGIATAN	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Pemeliharaan alat kantor (AC)	3
	Pemeliharaan alat studio (HT)	10
	Pemeliharaan komputer dan printer	7
	JUMLAH	43

Formulasi Perhitungan Program:

$$\frac{\text{Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran yang dapat dipenuhi}}{\text{Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran yang direncanakan}} \times 100 = \frac{43}{138} \times 100 = 31\%$$

Lumajang, 2 April 2026
Sekretaris



AGUNG KUNCORO WICAKSONO, S.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19840330 200903 1 004



**LAPORAN KINERJA PEJABAT ESELON III
TRIWULAN I TAHUN 2026
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

NAMA : MOCHAMMAD CHAIDIR SHOLEH, S.STP
NIP : 19920608 201507 1 001
PANGKAT : PENATA TK I
GOLONGAN : III/d
**JABATAN : KEPALA BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN
UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2026 pada Triwulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan atas pencapaian kinerja Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja yang mendasari Peraturan Bupati nomor 43 tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.

1.1 TUGAS POKOK

Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Lumajang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan tugas di Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat meliputi operasi dan pengendalian, kerja sama, peningkatan sumber daya aparatur dan tindak internal serta pelaksanaan pelindungan masyarakat

1.2 FUNGSI

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat;
- b. Penyusunan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, kerjasama, peningkatan sumber daya aparatur dan tindak internal.
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

- d. Fasilitasi kerjasama dengan instansi dan institusi terkait dibidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat;
- e. Peningkatan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Penetapan bentuk tindak internal dan jenis pelanggaran terhadap anggota satuan Polisi Pamomg Praja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II **AKUNTABILITAS KINERJA**

2.1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang ditandatangani antara Kepala Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, memuat sasaran program dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang , adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja
Kepala Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Trantibum	100%
2	Meningkatnya Perlindungan terhadap Masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	100%

Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat mengampu sasaran program dan anggaran kegiatan. Program Peningkatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Trantibum dan target sebesar 100 % serta Program Peningkatan Perlindungan terhadap Masyarakat dengan indikator kinerja Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat dan target sebesar 100 %

2.2 PENGUKURAN KINERJA

• CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja
Kepala Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Ket
			Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)
1	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Trantibum	100%	100%	100 %	
2	Meningkatnya Perlindungan terhadap Masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	100%	100%	100 %	

1. Target indikator Persentase Penyelenggaraan Trantibum tahun 2026 sebesar 100%, dengan realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 100%, terbagi menjadi 100% di Triwulan I. Capaian kinerja sampai dengan triwulan I sebesar 100 %. Adapun perhitungannya dapat dilihat berikut ini.

Formulasi Perhitungan :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} & & \text{Jumlah Gangguan Trantibum yang} & & \\
 \text{Penyelenggaraan} & & \text{ditindaklanjuti} & & \\
 \text{Trantibum} & = & \frac{\text{Gangguan Trantibum yang terjadi}}{\text{Gangguan Trantibum yang terjadi}} & \times & 100 \\
 & = & \frac{1.482}{1.482} & \times & 100 \\
 & = & 100 \% & &
 \end{aligned}$$

Gangguan trantibum yang ditindaklanjuti sampai dengan triwulan I Tahun 2026 sebanyak 1.482 Kasus. Sedangkan Gangguan trantibum yang terjadi sampai dengan triwulan I Tahun 2026 sebanyak 1.482 Kasus, Adapun rekapnya dapat dilihat pada Penyajian Data Kinerja

2. Target indikator Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat tahun 2026 sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 100 %, terbagi menjadi 100% di Triwulan I. Capaian kinerja sampai dengan triwulan I sebesar 100%. Adapun perhitungannya dapat dilihat berikut ini.

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Cakupan} &= \frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki Linmas Aktif}}{\text{Seluruh Desa/Kelurahan}} \times 100 \\
 \text{Perlindungan Masyarakat} &= \frac{205}{205} \times 100 \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki Linmas Aktif sampai dengan triwulan I Tahun 2026 sebanyak 205 Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki Linmas Aktif.

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan I Tahun 2026:

Tabel 2.3
Capaian Kinerja
Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Rencana Aksi

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Ket
			Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)
1	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Trantibum	100 %	100 %	100 %	
2	Meningkatnya Perlindungan terhadap Masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	100 %	100 %	100 %	

1. Target indikator Persentase Penyelenggaraan Trantibum pada triwulan I tahun 2026 sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 100 % Capaian kinerja pada triwulan I sebesar 100 %. Adapun formulasi perhitungannya yakni:
- 2.

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} &= \frac{\text{Jumlah Gangguan Trantibum yang ditindaklanjuti}}{\text{Gangguan Trantibum yang terjadi}} \times 100 \\
 \text{Penyelenggaraan} &= \frac{1.482}{1.482} \times 100 \\
 \text{Trantibum} &= 100 \%
 \end{aligned}$$

3. Target indikator Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat pada triwulan I tahun 2026 sebesar 100 %, dengan realisasi sebesar 100 %
Capaian kinerja pada triwulan I sebesar 100 %. Adapun formulasi perhitungannya yakni:

$$\begin{aligned} \text{Persentase Cakupan} & & \text{Jumlah Desa/Kelurahan yang} \\ \text{Perlindungan} & = & \text{memiliki Linmas Aktif} \\ \text{Masyarakat} & = & \frac{\text{Seluruh Desa/Kelurahan}}{\text{Seluruh Desa/Kelurahan}} \times 100 \\ & = & \frac{205}{205} \times 100 \\ & = & 100 \% \end{aligned}$$

Tabel 2.4 *Cost per Outcome*
Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2026 - sampai dengan Triwulan I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah penanganan pelanggaran gangguan trantibum	244 kejadian	59 kejadian	24,18 %				13,18 %
1.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					Rp. 4.779.285.000	Rp 525.645.000	11 %	

Tabel 2.5 *Cost per Outcome*
Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2026 - pada Triwulan I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah penanganan pelanggaran gangguan trantibum	59 kejadian	59 kejadian	100 %				35%
1.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota					Rp. 813.798.250	Rp 525.645.000	65%	

Tabel 2.6 Penyajian Data Kinerja
Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang
Tahun 2026 – sampai dengan Triwulan I

NO	KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	TW 1		KETERANGAN
			KEJADIAN	KASUS	
	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	59 kejadian			
	1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		55 kejadian	1.472 Kasus	<p>1. Patroli Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (tempat rawan minum – minuman keras) yang dilaksanakan selama Triwulan I sejumlah 41 kasus dan yang dilimpahkan ke bidang gakda sebanyak 15 Kasus</p> <p>2. Patroli Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (ODGJ) sejumlah 9 kasus dan yang dilimpahkan ke bidang gakda sebanyak 5 Kasus</p> <p>3. Patroli Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Tempat - Tempat Rawan Anjal) sejumlah 22 kasus dan yang dilimpahkan ke bidang gakda sebanyak 22 Kasus</p> <p>4. Patroli Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (PKL) sejumlah 107 kasus dan yang dilimpahkan ke bidang gakda sebanyak 107 Kasus</p> <p>5. Patroli Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Gepeng/badut) sejumlah 12 kasus dan yang dilimpahkan ke bidang gakda sebanyak 5 Kasus</p>

NO	KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	TW 1		KETERANGAN
			KEJADIAN	KASUS	
					6. Patroli Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Tempat - Tempat Rawan perbuatan Asusila) sejumlah Nihil kasus 7. Patroli Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Penertiban Reklame Layanan Umum Non perizinan) sejumlah 1.280 kasus dan dilaksanakan penghapusan di Akhir Triwulan I 8. Patroli Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Pengamanan Unjuk Rasa / Kerusuhan Massa) sejumlah 3 Kasus
	2. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Pelayanan Pengaduan Masyarakat)		3 Kejadian	10 Kasus	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Pelayanan Pengaduan Masyarakat) di Triwulan 1 sebanyak 10 kasus pengaduan
	3. Peningkatan Kapasitas Sdm Satuan Polisi Pamong Praja Dan Satlinmas		1 Kejadian	Nihil Kasus	Peningkatan Kapasitas Sdm Satuan Polisi Pamong Praja Dan Satlinmas yaitu 1. Fasilitasi Upacara bendera 8 kali fasilitasi
Di Triwulan I terdapat 59 Kejadian sebesar 1.482 Kasus					

Tabel 2.7 Efisiensi Kinerja
Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat sampai dengan TW I Tahun 2026

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah penanganan pelanggaran gangguan trantibum	Rp. 4.779.285.000	Rp 525.645.000	11 %	244 kejadian	59 kejadian	24,18 %	13,18%

Sasaran : Meningkatkan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah

- a. Anggaran sebesar Rp. 4.779.285.00, dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar Rp 525.645.000 dan capaian serapan anggaran adalah 11 %
- b. Target kinerja sebanyak 244 Kejadian, dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebanyak 59 kejadian dengan capaian kinerja sebesar 24,18 % .
- c. Terjadi efisiensi antara capaian kinerja dikurangi dengan capaian serapan anggaran sebesar sebesar 13,18 %

2.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

• ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka meningkatkan keberhasilan Capaian Kinerja Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat adapun tindak lanjut yang harus dilakukan adalah :

a. Soliditas Internal

Tingginya daya dukung dan sinergi kinerja antar personel di lapangan.

b. Optimalisasi Aset

Pemanfaatan sarana dan prasarana dinas secara efektif dalam mendukung pelayanan publik.

c. Sistem Manajerial

Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang konsisten.

d. Sinergi Antar-Lembaga

Penguatan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk penanganan gangguan ketenteraman secara komprehensif.

• ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian dalam pencapaian kinerja Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, antara lain:

a. Belum maksimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana dinas dalam menjangkau seluruh area pelayanan.

b. Frekuensi evaluasi pengawasan dan pengendalian internal yang perlu ditingkatkan guna menjaga konsistensi kualitas kerja pegawai.

c. Dinamika koordinasi dengan OPD terkait yang terkadang menghadapi kendala teknis di lapangan.

• UPAYA/SOLUSI UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM MENCAPAI KINERJA

Sebagai langkah strategis untuk mengatasi hambatan tersebut, langkah-langkah yang diambil adalah:

a. Komunikasi Berjenjang

Meningkatkan intensitas konsultasi dengan pimpinan guna mempercepat pengambilan keputusan terhadap kendala strategis di lapangan.

b. Akselerasi Instruksi

Merespons secara cepat dan tepat setiap instruksi pimpinan melalui langkah-langkah taktis yang terukur.

c. Kolaborasi Kewilayahan

Memperkuat koordinasi dengan jajaran samping (TNI/Polri) serta instansi vertikal lainnya untuk memastikan stabilitas ketertiban umum.

2.4 RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat adapun tindak lanjut yang harus dilakukan adalah mempertahankan capaian kinerja yang telah di raih, dalam Laporan Kinerja Triwulan I dengan target kinerja 59 Kejadian sampai dengan Triwulan I realisasi terdapat 1.489. Maka kami melanjutkan sisa target capaian kinerja pada tribulan berikutnya dan selalu menjaga kekompakan kerja tim.

2.5 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisai diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2026 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Adapun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah manajemen kerja yang mulai tersusun rapi, kerja tim yang kompak dan rasa tanggung jawab yang dimiliki personil cukup tinggi

Demikian LKj Interim Kepala Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat. LKj Interim ini sangat penting dan dapat digunakan sebagai media refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada publik (Masyarakat), selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama *stake holder* OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 2 April 2026

Mengetahui,
Atasan langsung
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja



HINDAM ADRI ABADAN, S.IP
NIP. 198807122007011002

Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban
Umum dan Pelindungan Masyarakat

MOHAMMAD CHAIDIR SHOLEH, S.STP.
NIP. 19920608 201507 1 001

LAMPIRAN

❖ DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MOCHAMMAD CHAIDIR SHOLEH, S.STP**

Jabatan : Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HINDAM ADRI ABADAN, S.IP**

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 13 Januari 2026

Pihak Pertama

Pihak Kedua

HINDAM ADRI ABADAN, S.IP
NIP. 19880712 200701 1 002


MOCHAMMAD CHAIDIR SHOLEH, S.STP.
NIP. 19920608 201507 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG**

No. (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Trantibum	100 %
2	Meningkatnya Perlindungan terhadap Masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	100%

No	Kegiatan	Anggaran Rp.	Keterangan
1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.388.466.000	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
Total		Rp 3.388.466.000	

Lumajang, 13 Januari 2026

Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum
dan Pelindungan Masyarakat

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja



HINDAM ADRI ABADAN, S.IP
NIP. 19880712 200701 1 002

MOHAMMAD CHAIDIR SHOLEH, S.STP.
NIP. 19920608 201507 1 001

❖ PENYAJIAN DATA KINERJA

**DATA JUMLAH ANGGOTA SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN LUMAJANG 2026**

NO.	KECAMATAN	DESA		JUMLAH ANGGOTA SATLINMAS	NOMOR SK
1	RANUYOSO	1	JENGGRONG	51	100.3.3.5/015/427.100.01/2024
		2	MENINJO	30	100.3.3.4/14/427.100.02/2024
		3	TEGALBANGSRI	30	100.3.3.5/16/427.100.03/2024
		4	SUMBERPETUNG	30	100.3.3.5/20/427.100.04/2024
		5	ALUN-ALUN	46	100.3.3.5/3/427.100.05/2024
		6	RANU BEDALI	46	100.3.3.5/025/427.100.06/2024
		7	RANUYOSO	44	100.3.3.5/4/427.100.07/2024
		8	WONOAYU	30	100.3.3.5/04/427.100.08/2024
		9	PENAWUNGAN	33	100.3.3.5/ 15 /427.100.09/2024
		10	WATES KULON	29	100.3.3.5/19/427.100.10/2024
		11	WATES WETAN	31	100.3.3.5/07/427.100.11/2024
JUMLAH		11		400	

2	KLAKAH	1	KEBONAN	19	188.45/01/427.99.01/2022
		2	KUDUS	26	188.45/10/427.99.02/2022
		3	DUREN	25	188.45/24/427.99.03/2022
		4	SUMBERWRINGIN	38	23 Tahun 2022
		5	PAPRINGAN	30	188.45/16/427.99.05/2022
		6	RANU PAKIS	39	188.45/15/427.99.06/2022
		7	TEGALRANDU	40	188.45/22/427.99.07/2022
		8	KLAKAH	26	36 Tahun 2022
		9	MLAWANG	50	560/85/427.99.09/2022
		10	TEGACIUT	30	188.45/15/427.99.10/2022
		11	SRUNI	19	188.45/17/427.99.11/2022
		12	SAWARAN LOR	34	188.45/28/427.99.12/2022
JUMLAH		12		376	

3	KEDUNGJAJANG	1	PANDANSARI	30	188.45/08/427.96.01/2022
		2	KRASAK	30	188.45/20/427.96.02/2024
		3	KEDUNGJAJANG	30	100.335/43/427.96.03/2023
		4	WONOREJO	30	188.45/54/427.96.04/2022
		5	UMBUL	35	100.3.3.5/20/427.96.05/2024
		6	CURAHPETUNG	32	100.3.3/3/427.96.06/2024
		7	GROBOGAN	45	100.335/11/427.96.07/2024
		8	BENCE	32	188.45/22/427.96.08/2022
		9	JATISARI	32	188.45/32/427.96.09/2022
		10	TEMPURSARI	35	188.45/15/427.96.10/2022
		11	BANDARAN	25	188.45/28/427.96.11/2022
		12	SAWARANKULON	50	100.3.3.5/003/427.96.24/2024
JUMLAH		12		406	

4	RANDUAGUNG	1	BANYUPUTIH LOR	39	188.45/38/427.98.01/2022
		2	KALIDILEM	46	188.45/20/427.98.02/2022
		3	TUNJUNG	39	188.45/21/427.98.03/2022
		4	GEDANGMAS	53	188.45/27/427.98.04/2022
		5	KALIPENGGUNG	62	188.45/28/427.98.05/2022
		6	RANULOGONG	47	188.45/33/427.98.06/2022
		7	RANDUAGUNG	45	188.45/464/427.98.07/2022
		8	LEDOK TEMPURO	49	188.45/12/427.98.08/2022
		9	PEJARAKAN	48	188.45/32/427.98.09/2022
		10	BUWEK	38	188.45/14/427.98.10/2022
		11	RANU WURUNG	45	188.45/22/427.98.11/2022
		12	SALAK	46	188.45/40/427.98.12/2022
JUMLAH		12		557	

5	JATIROTO	1	BANYUPUTIH KIDUL	34	188.45/07/427.97.01/2024
		2	ROJOPOLO	50	31 Tahun 2023
		3	SUKOSARI	50	188,45/08/427.97.05/2023
		4	KALIBOTO KIDUL	51	188.45/ 28 / 427.97.03/2023
		5	KALIBOTO LOR	88	300.1.4/20/427.97.04/2024
		6	JATIROTO	84	188.45/32/427.97.06/2022
JUMLAH		6		357	

6	ROWOKANGKUNG	1	NOGOSARI	30	100.3.3.5/5/427.88.01/2024
		2	KEDUNGREJO	35	100.3.3.5/ /427.88.02/2024
		3	SIDOREJO	30	188.4/14/427.88.03/2023
		4	ROWOKANGKUNG	50	188.4/55/427.88.04/2023
		5	SUMBERSARI	33	188.45/35/427.88.05/2023
		6	SUMBERANYAR	30	188.4/7/427.88.07/2023
		7	DAWUHAN WETAN	55	100.33/16/427.88.06/2024
JUMLAH		7		263	

7	YOSOWILANGUN	1	DARUNGAN	18	188.4/ 10 /427.87.01/2023
		2	KRATON	25	188.4/65/427.87.02/2023
		3	WOT GALIH	48	17 Tahun 2022
		4	TUNJUNGREJO	31	188.4/21/427.87.04/2022
		5	YOSOWILANGUN KIDUL	67	SK NO 14 TAHUN 2019
		6	YOSOWILANGUN LOR	54	188.45/49/427.87.06/2022
		7	KRAI	47	188.45/22/427.87.07/2022
		8	KARANGANYAR	32	100.3.3/13/427.87.08/2024
		9	KARANGREJO	15	188.4/13/427.87.09/2022
		10	MUNDER	40	188,45/51/427,87,10/2022
		11	KEBONSARI	32	100.3.3/6/427.87.11/2024
		12	KALIPEPE	39	188.45/32/427.87.12/2022
JUMLAH		12		448	

8	TEKUNG	1	WONOGRIYO	50	28 Tahun 2024
		2	WONOSARI	50	188.8/009/427.89.02/2024
		3	MANGUNSARI	50	NO.26
		4	TEKUNG	50	100.3.3.5/13/427.89.04/2024
		5	WONOKERTO	65	No. 31 tahun 2024
		6	TUKUM	65	nomor 26 Tahun 2024
		7	KARANGBENDO	55	39 Tahun 2022
		8	KLAMPOKARUM	50	23 Tahun 2022
	JUMLAH	8		435	

9	KUNIR	1	JATIMULYO	40	188.45/20/427.86.01/2022
		2	JATIREJO	38	100.3.3.5/19/427.86.02/2024
		3	JATIGONO	45	100.3.3.5/38/427.86.03/2024
		4	SUKOREJO	31	188.45/09/427.86.04/2023
		5	SUKOSARI	31	188.45/09/427.86.04/2023
		6	KUNIR KIDUL	23	42 Tahun 2024
		7	KUNIR LOR	45	188.45/23/427.86.07/2024
		8	KEDUNG MORO	26	188.45/36/427.86.08/2024
		9	KARANGLO	44	188.45/20/427.86.09/2022
		10	KABUARAN	31	188.45/22/427.86.10/2024
		11	DOROGOWOK	27	188.45/32/427.86.11/2023
	JUMLAH	11		381	

10	TEMPEH	1	JATISARI	30	188/22/427.85.09/2022
		2	TEMPEH KIDUL	43	188.45./13/427.85.03/2024
		3	PANDANARUM	40	188.45/26/427.85.13/2023
		4	LEMJENI	41	188.45/19/427.85.04/2024
		5	SUMBERJATI	29	188.45/20/427.85.02/2022
		6	KALIWUNGU	47	188.45/3/427.85.06/2023
		7	JOKARTO	37	188.45/16/427.85.12/2022
		8	GESANG	42	28 Tahun 2022
		9	PULO	70	188/122/427.85.09/2022
		10	TEMPEH LOR	32	188.45/28/427.85.07/2022
		11	TEMPEH TENGAH	31	188.45/25/427.85.05/2022
		12	BESUK	46	Nomer 17.6 TAHUN 2024
		13	PANDANWANGI	42	188.45/16/427.85.01/2024
	JUMLAH	13		530	

11	SUMBERSUKO	1	SUMBERSUKO	35	100.3.3.5/12/427.101.01/2024
		2	KEBONSARI	42	100.3.3.5/16/427.101. 02/2024
		3	GRATI	30	100.3.3.5/12/427.101.03/2024
		4	LABRUK KIDUL	38	100.3.3/6.1/427.101.04/2024
		5	MOJOSARI	33	SK NO. 04 TAHUN 2024
		6	SENTUL	32	100.3.3.5/10/427.101.06/2024
		7	PURWOSONO	32	100.3.3.5/17/427.101.07/2024
		8	PETAHUNAN	24	100.3.3.5/13/427.101.08/2024
	JUMLAH	8		266	

12	LUMAJANG	1	BANJARWARU	27	11 Tahun 2024
		2	LABRUK LOR	29	188.45/9/427.90.09/2024
		3	DENOK	31	24 TAHUN 2023
		4	BLUKON	30	188.45/21/427.90.11/2022
		5	BORENG	43	340/15/427.90.12/2024
		6	CITRODIWANGSAN	73	340/427.90/2024
		7	DITOTRUNAN	58	188.45/15/427.90.01/2022
		8	JOGOTRUNAN	38	340/20/427.90/2024
		9	JOGOYUDAN	45	340/26.1 /427.90/2022
		10	ROGOTRUNAN	67	188.45/23/427.90.05/2022
		11	TOMPOKERSAN	97	340/18/427.90/2024
		12	KEPUHARJO	39	340/23/427.90/2024
	JUMLAH	12		577	

13	SUKODONO	1	KLANTING	31	188,45/31/427,95,01/2024
		2	KEBONAN	30	27 Tahun 2022
		3	KARANGSARI	45	12 Tahun 2022
		4	DAWUHAN LOR	53	188.45/27/427.95.04/2022
		5	KUTORENON	50	188.45/71/427.95.05/2022
		6	SELOKBESUKI	33	188.45/12/427.95.07/2022
		7	SUMBEREJO	51	188.45/29/427.92.06/2023
		8	URANGGANTUNG	27	188.45/22/427.95.08/2022
		9	SELOKGONDANG	37	188.45/10/427.95.09/2022
		10	BONDOYUDO	31	188.45/22/427.95.10/2022
	JUMLAH	10		388	

14	PADANG	1	BARAT	31	188.45/41/427.94.01/2022
		2	BABAKAN	30	188.45/26/427.94.02/2022
		3	MOJO	32	188.45/10/427.94.03/2022
		4	BODANG	32	188.45/15/427.94.04/2022
		5	KEDAWUNG	32	188.45/12/427.94.05/2022
		6	PADANG	32	188.45/44/427.94.06/2022
		7	KALISEMUT	32	188.45/13/427.94.07/2022
		8	MERAKAN	32	188.45/18/427.94.08/2022
		9	TANGGUNG	31	188.45/28/427.94.09/2022
	JUMLAH	9		284	

15	GUCIALIT	1	WONOKERTO	25	188/02/427.94.01/2024
		2	PAKEL	31	188.45/27/427.93.02/2022
		3	KENONGO	30	188/ 16/427.93.03/2024
		4	DADAPAN	30	188.45/13/427.93.05/2022
		5	KERTOWONO	32	Nomer 31 Tahun 2022
		6	TUNJUNG	32	188.45/15/427.93.07/2022
		7	JERUK	34	188.45/18/427.98.08/22
		8	SOMBO	32	188.45/30/427.93.09/2022
		9	GUCIALIT	39	188.45/33/427.93.04/2022
	JUMLAH	9		285	

16	SENDURO	1	PURWOREJO	37	188.45/15/427.92.01/2022
		2	SARIKEMUNING	32	188.45/14/427.92.02/2022
		3	PANDANSARI	33	188.45/34/427.92.03/2022
		4	BURNO	27	188.45/24/427.92.04/2022
		5	KANDANGTEPUS	36	188.45/25/427.92.05/2022
		6	KANDANGAN	48	188.45/42/427.92.06/2022
		7	BEDAYU	38	188.45/18/427.92.07/2022
		8	BEDAYU TALANG	32	188.45/20/427.92.08/2022
		9	WONOCEPOKOAYU	30	188.45/37/427.92.09/2022
		10	ARGOSARI	26	188.45/23/427.92.10/2022
		11	RANUPANI	25	188.45/15/427.92.11/2022
		12	SENDURO	31	188.45/12/427.92.12/2022
JUMLAH		12		395	

17	PASRUJAMBE	1	PASRUJAMBE	76	Nomer 49, Tanggal 31 Desember 2023
		2	JAMBKUMBU	42	188.45/28/427.91.02/2022
		3	SUKOREJO	37	188.45/19/427.90.03/2022
		4	JAMBEARUM	33	188.45/17/427.91.04/2022
		5	KERTOSARI	31	188.45/34/427.91.05/2022
		6	PAGOWAN	30	188.45/23/427.91.06/2022
		7	KARANGANOM	40	27/2022 Tanggal 29 Juli 2022
JUMLAH		7		289	


18	CANDIPURO	1	JUGOSARI	30	188.45/24/427.83.01/2022
		2	JARIT	83	No. 7 Tahun 2024
		3	CANDIPURO	55	188.45/56/427.83.03/2022
		4	SUMBEREJO	42	188,45/D56
		5	SUMBERWULUH	58	188.45/15/427.83.05/2023
		6	SUMBERMUJUR	40	188.45/08/427.83.06/2022
		7	PENANGGAL	55	188.45/14/427.83.07/2022
		8	TAMBAHREJO	32	No. 16 Tahun 2024
		9	KLOPOSAWIT	33	188.45/22/427.83.09/2022
		10	TUMPENG	30	No. 13 tahun 2024
JUMLAH		10		458	

19	PASIRIAN	1	GONDORUSO	34	188.4/07 /427.84.01/2022
		2	KALIBENDO	50	300.1/ 2 /427.84.02/2024
		3	BADES	72	100.3.3.5/24/427.84.03/2024
		4	BAGO	53	188.45/23/427.84.04/2022
		5	SELOK AWAR-AWAR	53	00.3.3.5/13/427.84.05/2024
		6	CONDRO	30	188.45/27/427.84.06/2022
		7	PASIRIAN	93	188.4/30 /427.84.0/2023
		8	MADUREJO	31	188.45/17/427.84.07/2022
		9	SEMEMU	45	300.1.4/21/427.84.09/2024
		10	NGUTER	32	188.45/53/427.84.10/2022
		11	SELOKANYAR	39	188.45/44/427.84.11/2022
JUMLAH		11		532	

20	PRONOJIWO	1	SIDOMULYO	44	188.47/07427.82.01/2024
		2	PRONOJIWO	52	188.45/16/427.82.02/2024
		3	TAMANAYU	37	188.45/47/427.82.03/2022
		4	SUMBERURI	45	188.45/16/427.82.04/2023
		5	ORO-ORO OMBO	55	188.47/41/427.82.05/2023
		6	SIUPTURANG	40	300/08/427.82/06/2024
	JUMLAH	6		273	

21	TEMPURSARI	1	TEGALREJO	34	188.45/29/427.81.01/2022
		2	BULUREJO	30	188.45/19/427.81.02/2022
		3	PUROREJO	30	188.45/19/427.81.3/2022
		4	TEMPUREJO	30	188.45/13/427.81.04/2022
		5	TEMPURSARI	63	188.45/04/427.81.05 /2022
		6	PUNDUNGSARI	46	188.45/30/427.81.06/2022
		7	KALIULING	40	340/ 25 /427.81.07/2022
	JUMLAH	7		273	

❖ **DOKUMENTASI KEGIATAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT**

NO	JENIS LAPORAN KINERJA	DOKUMENTASI KEGIATAN
1.	Penertiban Reklame Layanan Umum Non perizinan	
2.	Pengaduan dan Penertiban PKL	
3.	Tempat - Tempat Rawan Minum - Minuman Keras	
4.	Tempat - Tempat Rawan Anjal/Gepeng	

5.	ODGJ	
6.	Pengamanan Kegiatan Keagamaan	
7.	Pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainnya	



**LAPORAN KINERJA PEJABAT ESELON III
TRIWULAN I TAHUN 2026
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

NAMA : ENNY ROSEITA HADI, S.IP, M.Si
NIP : 19910412 201206 2 001
PANGKAT : PENATA Tk. I
GOLONGAN : III/d
JABATAN : KEPALA BIDANG PENEGAKAN PRODUK HUKUM
DAERAH

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pengembangan kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2026 pada Triwulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan atas pencapaian kinerja Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja yang mendasari Peraturan Bupati nomor 43 tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.

1.1 TUGAS POKOK

Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, mempunyai tugas: Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan tugas di bidang penegakan produk hukum daerah yang meliputi pembinaan, dan penyuluhan masyarakat, pengawasan, penyelidikan dan penyidikan, teknis operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

1.2 FUNGSI

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;

- b. Penyusunan kebijakan teknis operasional penegakan produk hukum daerah;
- c. Pelaksanaan prosedur operasional, petunjuk teknis penegakan produk hukum daerah melalui penindakan non yustisi dan upaya yustisi ;
- d. Pelaksanaan supervisi penegakan produk hukum daerah;
- e. Pelaksanaan teknis operasional tugas penyidik pegawai negeri sipil melalui fasilitasi, pembinaan dan pengembangan kapasitas penyidik pegawai negeri sipil;
- f. Penyusunan basis data penanganan pelanggaran produk hukum daerah
- g. penentuan bentuk dan jenis pelanggaran terhadap produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- h. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan instansi, institusi dan masyarakat di bidang penegakan produk hukum daerah
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan produk hukum daerah
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang , adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja
Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah

No. (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Penanganan Pelanggaran Perda/Perkada	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada	100 %
2	Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya	100%

Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mengampu sasaran program dan anggaran kegiatan. Penjelasan terkait capaian kinerja dan anggaran akan dipaparkan pada sub bab pengukuran kinerja.

2.2 PENGUKURAN KINERJA

- **CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026**

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan I Tahun 2026:

Tabel 2.2
 Capaian Kinerja Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum
 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Ket
			Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Penanganan Pelanggaran Perda/Perkada	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada	100 %	100 %	100 %	
2	Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya	100%	88,88%	88,88 %	

1. Target indikator Persentase Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada sebesar 100%, dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar 100 %, Capaian kinerja sampai dengan triwulan I sebesar 100 %. Adapun perhitungannya dapat dilihat berikut ini.

Formulasi Perhitungan :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada} &= \frac{\text{Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada yang di BAP}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada}} \times 100 \\
 &= \frac{3.015}{3.015} \times 100 \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada yang di BAP sampai dengan triwulan I Tahun 2026 sebanyak 3.015 Kasus, Sedangkan Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada sampai dengan triwulan I Tahun 2026 sebanyak 3.015 Kasus. Adapun rekapnya dapat dilihat pada penyajian kinerja.

2. Target indikator Persentase PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya sebesar 100%, dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar 88,88%, Capaian kinerja sampai dengan triwulan I sebesar 100 %. Adapun perhitungannya dapat dilihat berikut ini.

Formulasi Perhitungan :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya} &= \frac{\text{Jumlah PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya}}{\text{Jumlah PPNS yang ada}} \times 100 \\
 &= \frac{8}{9} \times 100 \\
 &= 88,88 \%
 \end{aligned}$$

Jumlah PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya sampai dengan triwulan I Tahun 2026 sebanyak 8 orang, dikarenakan 1 orang tidak hadir. Sedangkan Jumlah PPNS yang ada sampai dengan triwulan I Tahun 2026 sebanyak 9 Orang. Adapun rekapnya dapat dilihat pada penyajian kinerja.

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan I Tahun 2026:

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Rencana Aksi

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Ket
			Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Penanganan Pelanggaran Perda/Perkada	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada	100 %	100 %	100 %	
2	Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya	100 %	88,88%	88,88 %	

1. Target indikator Persentase Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada pada triwulan I sebesar 100 %, dengan realisasi pada Triwulan I sebesar 100 %. Capaian kinerja pada triwulan I sebesar 100 %. Adapun perhitungannya dapat dilihat berikut ini.

Formulasi Perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Persentase} & & & & \text{Jumlah Penanganan} \\ \text{Penanganan} & & & & \text{Pelanggaran Perda dan Perkada} \\ \text{Pelanggaran Perda} & = & \frac{\text{yang di BAP}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda dan}} & \times 100 \\ \text{dan Perkada} & & \text{Perkada} & \\ & = & \frac{3.015}{3.015} & \times 100 \\ & = & 100 \% & \end{aligned}$$

Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada yang di BAP pada triwulan I Tahun 2026 sebanyak 3.015 Kasus, sedangkan Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada sampai dengan triwulan I Tahun 2026 sebanyak 3.015 Kasus. Realisasi indikator Persentase Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada pada triwulan I sebesar 100 %, dengan capaian pada triwulan I sebesar 100 %.

2. Target indikator Persentase PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya sebesar 100%, dengan realisasi pada Triwulan I sebesar 100 %. Capaian kinerja pada triwulan I sebesar 88,88 %.

Formulasi Perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Persentase PPNS} & & & & \text{Jumlah PPNS yang ditingkatkan} \\ \text{yang ditingkatkan} & = & \frac{\text{Kompetensinya}}{\text{Jumlah PPNS yang ada}} & \times 100 \\ \text{Kompetensinya} & & & \\ & = & \frac{8}{9} & \times 100 \\ & = & 88,88 \% & \end{aligned}$$

Jumlah PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya pada triwulan I Tahun 2026 sebanyak 8 orang, dikarenakan 1 orang tidak hadir,

sedangkan Jumlah PPNS yang ada sampai dengan triwulan I Tahun 2026 sebanyak 9 Orang.

Tabel 2.4 *Cost per Outcome*
Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Tahun 2026 – sampai dengan Triwulan I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1	Meningkatnya Penegakan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	Jumlah penanganan pelanggaran Perda Perkada Sesuai SOP	8.000 Kasus	3.015 Kasus	37,68 %				
		Persentase Perda/ Perkada yang ditegakkan	27,59%	24,73%	89,64 %				
2	Meningkatnya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang terbina	100%	88,88 %	88,88 %				
		Jumlah anggota Satpol PP yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS	5 orang	5 orang	100 %				

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
3	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan pelanggaran gangguan trantibu	1 Kejadian	1 Kejadian	100 %				
1.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota					Rp 163.700.500	Rp 26.275.000,00	16,05 %	83,95
2.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota					Rp 2.825.000,00	Rp 0,00	0 %	0
3	Penanganan Gangguan Ketentraman					Rp 1.224.293.500,00	Rp 0,00	0 %	0

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
	dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								

Tabel 2.5 *Cost per Outcome*
Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Tahun 2026 – pada Triwulan I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1	Meningkatnya Penegakan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	Jumlah penanganan pelanggaran Perda Perkada Sesuai SOP	1.071 Kasus	3,015 Kasus	281,51 %				
		Persentase Perda/ Perkada yang ditegakkan	27,59%	24,73%	89,64 %				
2	Meningkatnya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang terbina	100%	88,88 %	88,88 %				
		Jumlah anggota Satpol PP yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS	5 orang	5 orang	100 %				

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
3	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan pelanggaran gangguan trantibum	1 Kejadian	1 Kejadian	100 %				
1.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota					Rp 38.733.000,00	Rp 26.275.000,00	67,83 %	213,68
									21,81
2.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota					Rp. 275.000,00	Rp 0	0 %	88,88
									100

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
3	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					Rp 64.240.000,00	Rp 0	0 %	100

• **PENYAJIAN DATA KINERJA**

Tabel 2.6 Pengukuran Data Kinerja
Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
1	Meningkatnya Penegakan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah penanganan pelanggaran Perda Perkada Sesuai SOP	8.000 Kasus	3.015 Kasus	37,68 %
		Persentase Perda/ Perkada yang ditegakkan	27,59%	24,73 %	89,63 %
2	Meningkatnya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang terbina	100%	88,88 %	88,88 %
		Jumlah anggota Satpol PP yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS	5 orang	5 orang	100 %
3	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan pelanggaran gangguan trantibum	1 Kejadian	1 Kejadian	100 %

1. Sasaran : Meningkatkan Penegakan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

- Target indikator kinerja Jumlah penanganan pelanggaran Perda Perkada Sesuai SOP selama 1 tahun sebesar 8.000 kasus, dengan realisasi sampai dengan triwulan I sebanyak 3.015 kasus, Adapun rincian kasus yang ditangani adalah sebagai berikut:
 - a. Dokumen Hasil Kegiatan Penggalan Informasi Barang Kena Cukai Ilegal Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Februari 2026, sebanyak **242** toko dan ditemukan 14 toko yang melakukan transaksi jual beli rokok ilegal, dibuat dalam 1 Dokumen.

- b. Dokumen Hasil Kegiatan Penggalan Informasi Barang Kena Cukai Ilegal Bidang Penengakan Produk Hukum Daerah Maret 2026, sebanyak **240** toko dan tidak ditemukan toko yang melakukan transaksi jual beli rokok illegal, dibuat dalam 1 Dokumen.
- c. Laporan Hasil Penertiban Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Bidang Penengakan Produk Hukum Daerah Januari 2026 sebanyak 17 Kegiatan Penanganan Tindak Lanjut dengan total **476** kasus, dibuat dalam 1 Laporan.
- d. Laporan Hasil Penertiban Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Bidang Penengakan Produk Hukum Daerah Februari 2026 sebanyak 13 Kegiatan Penanganan Tindak Lanjut dengan total **307** kasus, dibuat dalam 1 Laporan.
- e. Laporan Hasil Penertiban Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Bidang Penengakan Produk Hukum Daerah Maret 2026 sebanyak 8 Kegiatan Penanganan Tindak Lanjut dengan total **501** kasus, dibuat dalam 1 Laporan.
- f. Laporan Hasil Penertiban Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Bidang Penengakan Produk Hukum Daerah Januari-Maret 2026 sebanyak 38 Kegiatan Penanganan Tindak Lanjut dengan total 1.284 kasus, dibuat dalam 1 Laporan.
- g. Laporan Kinerja Bulan Januari Tahun 2026 Tentang Pengawasan, Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepada Pelaku Usaha di Wilayah Kabupaten Lumajang, sebanyak **1** kasus, dibuat dalam 1 Laporan.
- h. Laporan Kinerja Bulan Februari Tahun 2026 Tentang Pengawasan, Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepada Pelaku Usaha di Wilayah Kabupaten Lumajang, sebanyak **47** kasus, dibuat dalam 1 Laporan.
- i. Laporan Kinerja Bulan Maret Tahun 2026 Tentang Pengawasan, Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepada Pelaku Usaha

- Target indikator Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang terbina selama 1 tahun sebesar 100%, dengan realisasi sampai dengan triwulan I sebanyak 100 %.

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase PPNS} & & & \text{Jumlah PPNS yang telah dibina} \\
 \text{yang terbina} & = & \frac{\text{Jumlah Seluruh PPNS di}}{\text{Kabupaten Lumajang}} & \times 100 \\
 & = & \frac{8}{9} & \times 100 \\
 & = & 88,88 \% &
 \end{aligned}$$

Jumlah PPNS yang telah dibina sampai dengan triwulan I sebanyak 8 orang, dikarenakan satu anggota PPNS dari instansi terkait tidak hadir. Capaian kinerja sampai dengan triwulan I sebesar 88,88%.

- Target Indikator Jumlah anggota Satpol PP yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS sebanyak 5 orang, dengan realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 5 orang, Capaian kinerja sampai dengan triwulan I sebesar 100 %.

3. Sasaran : Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Target indikator Jumlah penanganan pelanggaran gangguan trantibum selama 1 tahun sebesar 1 kejadian, dengan realisasi sampai dengan triwulan I sebanyak 1 kejadian. Adapun kejadian yang dimaksud yakni :
 - a. Laporan penanganan pelanggaran gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Satpol PP Kab.Lumajang Triwulan I Tahun 2026.

• **EFISIENSI KINERJA**

Tabel 2.5 Efisiensi Kinerja Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Meningkatnya Penegakan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	Jumlah penanganan pelanggaran Perda Perkada Sesuai SOP	Rp 163.700.500	Rp 26.275.000,00	16,05 %	8.000 Kasus	3.015 Kasus	37,68 %	21,63
		Persentase Perda/ Perkada yang ditegakkan				27,59%	24,73 %	89,63 %	73,58
2	Meningkatnya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang terbina	Rp 2.825.000,00	Rp Rp 0,00	0 %	100%	88,88 %	88,88 %	88,88
		Jumlah anggota Satpol PP yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS				5 orang	5 orang	100 %	100
3	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketentraman	Jumlah penanganan pelanggaran	Rp 1.224.293.500,00	Rp 0,00	0 %	1 Kejadian	1 Kejadian	100 %	100

dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta	gangguan trantibum								
---	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Sasaran: Meningkatkan Penegakan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
 - a. Anggaran pagu sesuai RKA dalam 1 tahun sebesar Rp 163.700.500,00 dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar Rp 26.275.000,00 sehingga capaian realisasi anggaran sebesar 16,05 %
 - b. Target indikator kinerja jumlah penanganan pelanggaran perda/perkada sesuai SOP selama 1 tahun sebesar 8.000 kasus, dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebanyak 3.015 kasus sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 37,68 %
 - c. Terjadinya efisiensi sebesar 21,63
2. Sasaran: Meningkatkan Penegakan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
 - a. Anggaran pagu sesuai RKA dalam 1 tahun sebesar Rp 163.700.500,00 dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar Rp 26.275.000,00 sehingga capaian realisasi anggaran sebesar 16,05 %
 - b. Target indikator kinerja Persentase Perda/Perkada yang ditegakkan selama 1 tahun sebesar 27,59%, dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebanyak 24,73 % sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 89,63 %
 - a. Terjadinya efisiensi sebesar 73,58

3. Sasaran: Meningkatnya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
 - a. Anggaran pagu sesuai RKA dalam 1 tahun sebesar Rp 2.825.000,00, dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar Rp 0 sehingga capaian realisasi anggaran sebesar 0 %
 - b. Target indikator kinerja Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang terbina selama 1 tahun sebesar 100%, dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebanyak 88,88% sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 88,88 %
 - c. Terjadinya efisiensi sebesar 88,88
4. Sasaran: Meningkatnya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
 - a. Anggaran pagu sesuai RKA dalam 1 tahun sebesar Rp 2.825.000,00, dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar Rp 0 sehingga capaian realisasi anggaran sebesar 0 %
 - b. Target indikator kinerja Jumlah anggota Satpol PP yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS selama 1 tahun sebesar 5 orang, dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebanyak 5 orang sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 100 %
 - c. Terjadinya efisiensi sebesar 100
5. Sasaran: Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Anggaran pagu sesuai RKA dalam 1 tahun sebesar Rp 1.224.293.500,00, dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar Rp 0 sehingga capaian realisasi anggaran sebesar 0 %

- b. Target indikator kinerja Jumlah penanganan pelanggaran gangguan trantibum selama 1 tahun sebesar 1 Kejadian, dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebanyak 1 kejadian sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 100 %
- c. Terjadinya efisiensi sebesar 100

2.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

• ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

1. Tersedianya SOP Penanganan
2. Team Penanganan yang Solid
3. Dapat bersinergi dengan antar bidang di Satpol PP dan OPD terkait.
4. Adanya akses CCTV Kabupaten Lumajang dari Dishub.
5. Sarana dan Prasarana Bekerja Memadai.
6. Sinergi Satpol PP dengan Pemangku wilayah terjalin Baik.
7. Tersedianya anggaran yang memadai.
8. Adanya akses CCTV Kabupaten Lumajang dari Dishub.
9. Tingkat keakuratan hasil Penggalan Informasi BKC Ilegal valid
10. Anggaran Pemberantasan BKC Ilegal memadai.
11. Adanya Kesadaran Lembaga Pendidikan untuk bekerja sama dengan Satpol PP terkait sosialisasi penyimpangan perilaku remaja dan bullying mendukung inovasi Satpol PP Ayo Main Ke Sekolah.
12. Tersedianya Tim Sosialisasi yang solid.

• ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

1. Kebijakan dana transfer DBHCHT pada pelaksanaan DPA Tahun 2026 belum disalurkan ke daerah pada triwulan I, sehingga kegiatan yang terjadwal di triwulan I dengan menggunakan sumber dana DBHCHT belum dapat diserap, walaupun kegiatan tetap dijalan sesuai jadwal. Jumlah pendanaan DAU untuk operasional kegiatan belum memadai.
2. Pendanaan yang mundur karena poin (1), maka penyerapan anggaran kegiatan Satuan Polisi pamong praja pada penggalan informasi BKC Ilegal yang dilakukan sesuai jadwal di bulan february dan maret belum dapat memberikan kontribusi pada kinerja anggaran.
3. Tidak adanya tempat penyimpanan/Gudang untuk barang titipan hasil penertiban yang membutuhkan waktu dalam penanganan dan pengurusannya.
4. Tidak adanya ruang khusus pemeriksaan dan penyidikan.
5. Rumah singgah/rumah aman hasil penertiban kurang memadai.

6. Data pendukung di wilayah kurang lengkap dan kurang update.
7. Minimnya tingkat kesadaran pelaku usaha untuk mengurus perizinan usahanya.
8. Minimnya informasi yang didapat pelaku usaha terkait perizinan.
9. Kerawanan bocornya informasi pada sasaran penggalian dan operasi.
10. Jaringan internet di daerah target operasi kurang stabil/memadai.

• **UPAYA/SOLUSI UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM MENCAPAI KINERJA**

1. Tetap melaksanakan kegiatan penanganan pelanggaran perda/perkada yang tidak memerlukan pendanaan, namun kegiatan dimaksud hanya terbatas pada BAP dan Pembinaan serta pemberian sanksi sosial.
2. Kegiatan pengumpulan informasi BKC Ilegal sebagai sasaran operasi gabungan pemberantasan BKC Ilegal tetap dilakukan menggunakan SPJ Rampung.
3. Mengurangi kegiatan pengumpulan orang tatap muka (menyesuaikan dengan kesediaan anggaran), namun diganti dengan pengoptimalan penyebaran informasi melalui media sosial dan media lainnya
4. Mengajukan pembangunan gudang untuk menyimpan titipan barang hasil penertiban.
5. Mengajukan pembangunan ruang pemeriksaan dan penyidikan untuk penanganan pelanggar.
6. Koordinasi dengan OPD Terkait.
7. Melakukan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan pelaku usaha secara berkala.
8. Berkoordinasi dengan OPD pengampu dalam hal ini Diskopindag dan DPMPTSP, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, untuk updating data dan perizinan pelaku usaha.
9. Bersinergi dengan OPD terkait untuk melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha.
10. Memperbaiki mekanisme teknis penggalian informasi sampai dengan pelaksanaan operasi .

11. Melaksanakan Inovasi Satpol PP Ayo Main Ke Sekolah secara berkala dengan tetap memasukkan kedalam dokumen perencanaan dan dokumen oenganggaran guna mendukung terlaksananya kegiatan inovasi tersebut.

2.4 RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, adapun tindak lanjut yang harus dilakukan adalah:

1. Tetap melaksanakan tugas sesuai SOP
2. Bersinergi dengan OPD terkait
3. Selalu berkoordinasi dengan Pimpinan
4. Bersinergi dan berkolaborasi dengan Lembaga Sekolah
5. Berkoordinasi dengan Bea Cukai Probolinggo
6. Ada sekitar 71 Pelaku Usaha yang sudah terdata dan dilakukan binwas untuk di monev kepatuhannya.

2.5 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisai diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

BAB III PENUTUP

Capaian Kinerja Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dengan Target indikator Persentase Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada sebesar 100%, dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar 100 %, Capaian kinerja sampai dengan triwulan I sebesar 100 %. Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada yang di BAP sampai dengan triwulan I Tahun 2026 sebanyak 3.015 Kasus, Adapun rekapnya dapat dilihat pada penyajian kinerja. Target indikator Persentase PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya sebesar 100%, dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar 88,88% dengan capaian kinerja sebesar 88,88%. Target Indikator Persentase Perda/Perkada yang ditegakkan sebesar 27,59%, dengan realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 24,73 % dengan capaian kinerja sebesar 89,63 %

Adapun faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja Triwulan I pada Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah adalah dimulai dari upaya preventif melalui kegiatan penyuluhan/sosialisasi dan kegiatan pembinaan pengawasan, dilanjutkan penegakan melalui kegiatan penanganan pelanggaran perda/perkada yakni dengan tersedianya SOP penanganan, dengan tim penanganan yang solid, dan bila didukung sarana dan prasarana yang memadai, serta dapat bersinergi dengan OPD terkait, maka dapat mendukung keberhasilan capaian kinerja bidang. Untuk mendukung inovasi Satpol PP Ayo Main Ke Sekolah agar terlaksana secara berkelanjutan maka dibutuhkan kerjasama dan penyamaan persepsi dengan lembaga pendidikan dan orang tua siswa, tersedianya tim sosialisasi yang solid juga salah satu faktor yang mendukung inovasi dimaksud,

Adapun faktor penghambat keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan I yaitu selain sarana dan prasarana pendukung belum memadai, belum tersedianya anggaran yang memadai pada operasional

kegiatan yang bersumber dari DAU, juga disumbang oleh adanya kebijakan penyaluran DBHCHT yang belum dilaksanakan oleh pemerintah pusat pada triwulan I, sehingga perlu berproses pada penyesuaian anggaran dan *time schedule* anggaran kegiatan Triwulan I.

Demikian LKj Interim Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah. LKj Interim ini sangat penting dan dapat digunakan sebagai media refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada publik (Masyarakat), selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama *stakeholder* OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 1 April 2026

Mengetahui,
Atasan langsung
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja



HINDAM ADRI ABADAN, S.IP
NIP. 198807122007011002

Kepala Bidang Penegakan
Produk Hukum Daerah



ENNY ROSEITA HADI, S.IP, M.Si.
NIP. 19910412 201206 2 001

❖ DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ENNY ROSEITA HADI, S.IP, M.Si.**

Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HINDAM ADRI ABADAN, S.IP**

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Lumajang, Januari 2025

PIHAK PERTAMA

ENNY ROSEITA HADI, S.IP, M.Si.
NIP. 19910412 201206 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG**

No. (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Penanganan Pelanggaran Perda/Perkada	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada	100 %
2	Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya	100 %

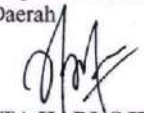
No	Kegiatan	Anggaran Rp.	Keterangan
1	Penegakan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp 163.700.500,00	DAU
2	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rp 2.825.000,00	DAU
3	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.224.293.500,00	DBHCHT
Total		Rp 1.390.819.000,00	

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja



HINDAM ADRIABADAN, S.IP
NIP. 19880712 200701 1 002

Lumajang, 13 Januari 2026
Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum
Daerah



ENNY ROSEITA HADI, S.IP, M.Si.
NIP. 19910412 201206 2 001

❖ **DOKUMEN BUKTI DUKUNG DATA KINERJA**

PENANGANAN 2026							
NO	Jenis Pelanggar	TW I	TW II	TW III	TW IV	JUMLAH	
1	PKL	14					Orang
2	WASLIDIK	12					Kasus (SPPG, Pengawasan Bersama Dinkes, Dumas)
3	ASET DAERAH	0					Orang
4	MIRAS DAN NARKOTIKA	15					Orang
5	PENYIMPANGAN REMAJA	16					Orang
6	PPKS	5					Orang
7	ODGJ	5					Orang
8	ANJAL & PUNK	10					Orang
9	ASUSILA	0					Pelaku Usaha
10	PELAKU USAHA	59					Toko
11	TOKO ROKOK ILEGAL	0					Toko
12	TOKO MIRAS (DBHCHT)	0					Objek
13	PENGGALIAN INFORMASI	482					Toko
14	REKLAME INSIDENTIL	1218					Objek
15	PERIJINAN REKLAME TETAP	1					Orang
16	BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS	0					Orang
17	SOSIALISASI CUKAI DBHCHT	0					Orang
18	SOSIALISASI AYO MAIN KE SEKOLAH	1167					Orang
19	RAPAT KOORDINASI ANGGOTA PPNS	11					Orang
TOTAL		3015	0	0	0	0	
Data s.d -							

❖ **REKAPITULASI LAPORAN**

NO	NAMA KEGIATAN	PERIODE	JUDUL LAPORAN	JUMLAH
1	Penanganan Pelajar Pelanggar Norma dan Tindak Lanjut Penanganan	Januari s/d Maret 2026	Laporan Penanganan Pelajar Pelanggar Norma dan Tindak Lanjut Penanganan pada Triwulan 1 sebanyak 2 Kegiatan Penanganan Tindak Lanjut dengan total 2 pelanggar, dibuat dalam 1 Laporan.	1
2	Sosialisasi Satpol PP Ayo Main Ke Sekolah	31 Maret 2026	Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Sosialisasi Satpol PP Ayo Main Ke Sekolah	1
3	Pembinaan Dan Penyuluhan Kepada Pelajar Yang Mengonsumsi Minuman Beralkohol Dan Pelajar Yang Membolos Pada Saat Jam Sekolah	31 Januari 2026	Laporan Tentang Kinerja Bulan Januari Tahun 2026 Pembinaan Dan Penyuluhan Kepada Pelajar Yang Mengonsumsi Minuman Beralkohol Dan Pelajar Yang Membolos Pada Saat Jam Sekolah	1
		28 Februari 2026	Laporan Tentang Kinerja Bulan Februari Tahun 2026 Pembinaan Dan Penyuluhan Kepada Pelajar Yang Mengonsumsi Minuman Beralkohol Dan Pelajar Yang Membolos Pada Saat Jam Sekolah	1

		31 Maret 2026	Laporan Tentang Kinerja Bulan Maret Tahun 2026 Pembinaan Dan Penyuluhan Kepada Pelajar Yang Mengonsumsi Minuman Beralkohol Dan Pelajar Yang Membolos Pada Saat Jam Sekolah	1
4	Kegiatan Penggalan Informasi Barang Kena Cukai Ilegal Bidang Penengakan Produk Hukum Daerah Tahun 2026	Februari 2026	Dokumen Hasil Kegiatan Penggalan Informasi Barang Kena Cukai Ilegal Bidang Penengakan Produk Hukum Daerah Februari 2026, sebanyak 242 toko dan ditemukan 14 toko yang melakukan transaksi jual beli rokok ilegal, dibuat dalam 1 Dokumen.	1
		Maret 2026	Dokumen Hasil Kegiatan Penggalan Informasi Barang Kena Cukai Ilegal Bidang Penengakan Produk Hukum Daerah Maret 2026, sebanyak 240 toko dan tidak ditemukan toko yang melakukan transaksi jual beli rokok ilegal, dibuat dalam 1 Dokumen.	1
5	Penertiban Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Bidang Penengakan Produk Hukum Daerah	Januari 2026	Laporan Hasil Penertiban Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Bidang Penengakan Produk Hukum Daerah Januari 2026 sebanyak 17	1

			Kegiatan Penanganan Tindak Lanjut dengan total 476 kasus, dibuat dalam 1 Laporan.	
		Februari 2026	Laporan Hasil Penertiban Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Bidang Penengakan Produk Hukum Daerah Februari 2026 sebanyak 13 Kegiatan Penanganan Tindak Lanjut dengan total 307 kasus, dibuat dalam 1 Laporan.	1
		Maret 2026	Laporan Hasil Penertiban Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Bidang Penengakan Produk Hukum Daerah Maret 2026 sebanyak 8 Kegiatan Penanganan Tindak Lanjut dengan total 501 kasus, dibuat dalam 1 Laporan.	1
		Januari s/d Maret 2026	Laporan Hasil Penertiban Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Bidang Penengakan Produk Hukum Daerah Januari-Maret 2026 sebanyak 38 Kegiatan Penanganan Tindak Lanjut dengan total 1.284 kasus, dibuat dalam 1 Laporan.	1

6	Pengawasan, Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepada Pelaku Usaha di Wilayah Kabupaten Lumajang	Januari 2026	Laporan Kinerja Bulan Januari Tahun 2026 Tentang Pengawasan, Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepada Pelaku Usaha di Wilayah Kabupaten Lumajang, sebanyak 1 kasus, dibuat dalam 1 Laporan.	1
		Februari 2026	Laporan Kinerja Bulan Februari Tahun 2026 Tentang Pengawasan, Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepada Pelaku Usaha di Wilayah Kabupaten Lumajang, sebanyak 47 kasus, dibuat dalam 1 Laporan.	1
		Maret 2026	Laporan Kinerja Bulan Maret Tahun 2026 Tentang Pengawasan, Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepada Pelaku Usaha di Wilayah Kabupaten Lumajang, sebanyak 23 kasus, dibuat dalam 1 Laporan.	1
7	Rapat Koordinasi PPNS Kabupaten Lumajang di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang	Maret 2026	Laporan Hasil Kegiatan Rapat Koordinasi PPNS Kabupaten Lumajang di Satuan Polisi	1

			Pamong Praja Kabupaten Lumajang Maret 2026, sebanyak 11 peserta.	
TOTAL				15 Laporan



**LAPORAN KINERJA PEJABAT ESELON III
TRIWULAN I TAHUN 2026
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

NAMA : MOH. ASRO IBNU ZARKASYI, S.Sos., MM
NIP : 19721102 199403 1 006
PANGKAT : Pembina
GOLONGAN : IV/a
JABATAN : KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pengembangan kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2026 pada Triwulan I ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan atas pencapaian kinerja Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja yang mendasari Peraturan Bupati nomor 43 tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.

1.1 TUGAS POKOK

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, mempunyai tugas: Merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkan tugas di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan yang meliputi pencegahan kebakaran dan non kebakaran, pengendalian bahaya kebakaran melalui pemadaman, penyelamatan dan pengelolaan sarana prasarana.

1.2 FUNGSI

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- b. Penyusunan teknis operasional di Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- c. Pelaksanaan sosialisasi, simulasi, pengawasan dan pembinaan pencegahan, pengendalian dan evakuasi kebakaran terhadap instansi, institusi dan Masyarakat;
- d. Pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan dan sarana prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

- e. Pelaksanaan peningkatan kapasitas dan pengembangan di Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- f. Pelaksanaan peningkatan kapasitas dan pengembangan di Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolak ukur menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang , adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja
Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No. (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Persentase Peningkatan Penyebaran Informasi Dan Edukasi Rawan Kebakaran	28,07 %
2	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	71 %

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengampu sasaran program dan anggaran kegiatan. Penjelasan terkait capaian kinerja dan anggaran akan dipaparkan pada sub bab pengukuran kinerja.

2.2 PENGUKURAN KINERJA

- **CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026**

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan I Tahun 2026:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Ket
			Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Persentase Peningkatan Penyebaran Informasi Dan Edukasi Rawan Kebakaran	28.07%	5%	17,81%	
2	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	71%	71,42%	100,59%	

1. Target indikator Persentase Peningkatan Penyebaran Informasi Dan Edukasi Rawan Kebakaran sebesar 28.07%, dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar 5%. Capaian kinerja sampai dengan triwulan I sebesar 17,81%. Adapun perhitungannya dapat dilihat berikut ini.

Formulasi Perhitungan :

$$\begin{aligned}
 &\text{Persentase Peningkatan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran} \\
 &= \frac{\text{Jumlah Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran Tahun (n)} - \text{Jumlah Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran Tahun (n-1)}}{\text{Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran Tahun (n-1)}} \times 100 \\
 &= \frac{21-20}{20} \times 100 \\
 &= 5\%
 \end{aligned}$$

Jumlah Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran sampai dengan triwulan I Tahun 2026 sebanyak 21 kegiatan. Sedangkan Jumlah Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran Tahun 2025 sebanyak 21 kegiatan. Kegiatan penyebaran informasi dan edukasi tetap dilaksanakan pada triwulan I, namun untuk penyerapan anggaran dilakukan pada triwulan II dan III.

2. Target Persentase Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran sebesar 71%, dengan realisasi sampai dengan Triwulan I

sebesar 71,42%. Capaian kinerja sampai dengan triwulan I sebesar 100,59%. Adapun perhitungannya dapat dilihat berikut ini.

Formulasi Perhitungan :

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase Pelayan} \\
 & \text{Penyelamatan Dan Evakuasi} \\
 & \text{Korban Kebakaran} \\
 & = \frac{\text{Jumlah Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran Di Kabupaten Kota Dalam Tingkat Waktu Tanggap}}{\text{Total Kejadian Kebakaran Di Kabupaten/Kota}} \times 100 \\
 & = \frac{10}{14} \times 100 \\
 & = 71,42\%
 \end{aligned}$$

Jumlah Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran Di Kabupaten Kota Dalam Tingkat Waktu Tanggap sampai dengan triwulan I Tahun 2026 sebanyak 10 kejadian. Sedangkan Total Kejadian Kebakaran Di Kabupaten/Kota sampai dengan triwulan I Tahun 2026 sebanyak 14 Kejadian. Adapun rekapnya dapat dilihat pada penyajian kinerja.

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan I Tahun 2026.

Tabel 2.3

Capaian Kinerja Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Rencana Aksi

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Ket
			Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW I	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Persentase Peningkatan Penyebaran Informasi Dan Edukasi Rawan Kebakaran	7%	5%	71,42%	
2	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	71%	71,42%	100,59%	

1. Target indikator Persentase Peningkatan Penyebaran Informasi Dan Edukasi Rawan Kebakaran pada triwulan I sebesar 7%, dengan realisasi pada Triwulan I sebesar 5%. Capaian kinerja pada triwulan I sebesar 71,42%. Adapun perhitungannya dapat dilihat berikut ini.

Formulasi Perhitungan :

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase Peningkatan Penyebaran Informasi Dan Edukasi Rawan Kebakaran} \\
 & = \frac{\text{Jumlah Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran Tahun (n)} - \text{Jumlah Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran Tahun (n-1)}}{\text{Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran Tahun (n-1)}} \times 100 \\
 & = \frac{21-20}{20} \times 100 \\
 & = 5\%
 \end{aligned}$$

Jumlah Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran pada triwulan I Tahun 2026 sebanyak 21 Kegiatan, sedangkan Jumlah Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran Tahun 2025 sebanyak 20 Kegiatan. Realisasi indikator Persentase Peningkatan Penyebaran Informasi Dan Edukasi Rawan Kebakaran pada triwulan I sebesar 5%, dengan capaian pada triwulan I sebesar 71,42%.

2. Target indikator Persentase Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran pada triwulan 1 sebesar 71%, dengan realisasi pada Triwulan I sebesar 71,42%. Capaian kinerja pada triwulan I sebesar 100,59%.

Formulasi Perhitungan :

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran} \\
 & = \frac{\text{Jumlah Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran Di Kabupaten Kota Dalam Tingkat Waktu Tanggap}}{\text{Total Kejadian Kebakaran Di Kabupaten/Kota}} \times 100 \\
 & = \frac{10}{14} \times 100 \\
 & = 71,42\%
 \end{aligned}$$

Jumlah Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran Di Kabupaten Kota Dalam Tingkat Waktu Tanggap pada triwulan I Tahun 2026 sebanyak 10 kejadian, sedangkan Total Kejadian Kebakaran Di Kabupaten/Kota pada triwulan I Tahun 2026 sebanyak 14 Kejadian. Meskipun realisasi kinerja melebihi target, namun terdapat 2 kejadian

kebakaran yang tidak tertangani dikarenakan tidak adanya laporan kepada damkar, dan 2 kejadian kebakaran yang tidak mencapai *respon time* dikarenakan lokasi kejadian yang jauh.

Tabel 2.4 *Cost per Outcome*
Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2026 – sampai dengan Triwulan I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1.	Meningkatnya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peresntase Penanganan Kejadian Kebakaran Dan Penanganan B3	100%	85,71%	85,71 %				71,88%
2.	Meningkatnya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Ketersediaan Peralatan Proteksi Kebakaran Sesuai Standart	100%	100%	100%				100%
3.	Meningkatnya Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran	100%	50%	50%				50%
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pemberdayaan	8,29%	40,48%	488,29 %				488,29%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
	dalam Pencegahan Kebakaran	Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran							
5.	Terlaksananya Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Penanganan Kasus Kondisi Membahayakan Manusia	100%	100%	100%				83,33%
1.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota					Rp 576.995.344	Rp 79.800.000	13,83%	71,88%
2.	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran					Rp 3.840.000,00	Rp 0	0%	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
3.	Investigasi Kejadian Kebakaran					Rp 2.560.000,00	Rp 0	0%	50%
4.	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran					Rp 5.645.000,00	Rp 0	0%	488,29%
5.	Penyelenggaraan Operasi Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia					Rp 3.600.000,00	Rp 600.000	16,67%	83,33%

Tabel 2.5 *Cost per Outcome*
Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2026 – pada Triwulan I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1.	Meningkatnya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peresntase Penanganan Kejadian Kebakaran Dan Penanganan B3	100%	85,71%	85,71%				26,11%
2.	Meningkatnya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Ketersediaan Peralatan Proteksi Kebakaran Sesuai Standart	100%	100%	100%				100%
3.	Meningkatnya Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran	100%	50%	50%				50%
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pemberdayaan	8,29%	40,48%	488,29%				488,29%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
	dalam Pencegahan Kebakaran	Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran							
5.	Terlaksananya Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Penanganan Kasus Kondisi Membahayakan Manusia	100%	100%	100%				33,4%
1.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota					Rp 133.891.000	Rp 79.800.000	59,60%	26,11%
2.	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran					Rp 480.000	Rp 0	0%	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
3.	Investigasi Kejadian Kebakaran					Rp 640.000	Rp 0	0%	50%
4.	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran					Rp 0	Rp 0	0%	488,29%
5.	Penyelenggaraan Operasi Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia					Rp 900.000	Rp 600.000	66,6%	33,4%

• **PENYAJIAN DATA KINERJA**

Tabel 2.6 Pengukuran Data Kinerja
Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
1.	Meningkatnya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Kejadian Kebakaran Dan Penanganan B3	100%	85,71%	85,71%
2.	Meningkatnya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Ketersediaan Peralatan Proteksi Kebakaran Sesuai Standart	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran	100%	50%	50%
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	8,29%	40,48%	488,29 %
5.	Terlaksananya Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Penanganan Kasus Kondisi Membahayakan Manusia	100%	100%	100%

1. Sasaran: Meningkatkan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Target Indikator Persentase Penanganan Kejadian Kebakaran Dan Penanganan B3 sebesar 100%, dengan realisasi sampai dengan triwulan I sebanyak 85,71%. Adapun Formulasi perhitungannya yakni:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} & & & \text{jumlah kejadian kebakaran dan} \\
 \text{Penanganan Kejadian} & = & \frac{\text{B3 yang di tangani}}{\text{jumlah kejadian kebakaran dan}} & \times 100 \\
 \text{Kebakaran dan} & & & \text{B3 yang dilaporkan} \\
 \text{Penanganan B3} & & & \\
 & = & \frac{12}{} & \times 100
 \end{aligned}$$

$$= \frac{14}{16} = 85,71\%$$

jumlah kejadian kebakaran dan B3 yang di tangani sampai dengan Triwulan I sebanyak 12 kejadian. Capaian kinerja sampai dengan triwulan I sebesar 85,71%. Terdapat 2 kejadian kebakaran yang tidak tertangani, hal ini dikarenakan tidak adanya laporan kepada damkar. Namun, tetap dilakukan pemeriksaan pasca kebakaran setelahnya.

2. Sasaran: meningkatnya inspeksi peralatan proteksi kebakaran

- Target Persentase Ketersediaan Peralatan Proteksi Kebakaran Sesuai Standart sebesar 100%, dengan realisasi sampai dengan triwulan I sebanyak 100%. Adapun Formulasi perhitungannya yakni:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Ketersediaan Peralatan Proteksi Kebakaran Sesuai Standart} &= \frac{\text{Jumlah Peralatan Proteksi Kebakaran yang di inspeksi sesuai standart}}{\text{jumlah Peralatan Proteksi Kebakaran yang tersedia}} \times 100 \\
 &= \frac{5}{5} \times 100 \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Jumlah Peralatan Proteksi Kebakaran yang di inspeksi sesuai standart sampai dengan Triwulan I sebanyak 5 kegiatan. Capaian kinerja sampai dengan triwulan I sebesar 100%.

3. Sasaran : Meningkatnya Investigasi Kejadian Kebakaran

- Target Indikator Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran sebesar 100%, dengan realisasi sampai dengan triwulan I sebanyak 50%. Adapun Formulasi perhitungannya yakni:

$$\begin{aligned} \text{Persentase Investigasi} &= \frac{\text{jumlah kejadian kebakaran yang}}{\text{di investigasi}} \times 100 \\ \text{Kejadian Kebakaran} &= \frac{7}{14} \times 100 \\ &= 50\% \end{aligned}$$

Jumlah kejadian kebakaran yang di investigasi sampai dengan Triwulan I sebanyak 7 kejadian. Capaian kinerja sampai dengan triwulan I sebesar 50%. Tidak semua kejadian kebakaran dilakukan pemeriksaan pasca kebakaran/investigasi, dikarenakan dalam melakukan kegiatan investigasi juga memepertimbangkan objek yang terbakar, adanya dokumen penting yang terbakar dan jumlah korban hingga kerugian.

4. Sasaran: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran

- Target Indikator Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran sebesar 8,29%, dengan realisasi sampai dengan triwulan I sebanyak 40,48%. Adapun Formulasi perhitungannya yakni:

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{\text{jumlah desa/kelurahan yang}}{\text{memiliki relawan pemadam}} \times 100 \\ \text{Pemberdayaan} &= \frac{83}{205} \times 100 \\ \text{Masyarakat dalam} &= 40,48\% \\ \text{Pencegahan} & \\ \text{Kebakaran} & \end{aligned}$$

jumlah desa/kelurahan yang memiliki relawan pemadam kebakaran sampai dengan Triwulan I sebanyak 83 desa/kelurahan. Capaian kinerja sampai dengan triwulan I sebesar 48,29%. Hal ini sesuai dengan diterbitkannya SK Pembentukan Redkar Kabupaten Lumajang di akhir

tahun 2025, sehingga terdapat beberapa desa/kelurahan yang telah terbentuk redkar.

5. Sasaran: Terlaksananya Penyelenggaraan Operasi Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

- Target Indikator Peresntase Persentase Penanganan Kasus Kondisi Membahayakan Manusia sebesar 100%, dengan realisasi sampai dengan triwulan I sebanyak 100%. Adapun Formulasi perhitungannya yakni:

$$\begin{aligned} \text{Peresntase} & & \text{jumlah kasus kondisi} \\ \text{Persentase} & & \text{membahayakan manusia yang} \\ \text{Penanganan Kasus} & = & \frac{\text{tertangani}}{\text{jumlah kasus kondisi}} \times 100 \\ \text{Kondisi} & & \text{membahayakan manusia} \\ \text{Membahayakan} & & \\ \text{Manusia} & & \\ & = & \frac{57}{57} \times 100 \\ & = & 100\% \end{aligned}$$

jumlah kasus kondisi membahayakan manusia yang tertangani sampai dengan Triwulan I sebanya 26 kasus. Capaian kinerja sampai dengan triwulan I sebesar 100%

• **EFISIENSI KINERJA**

Tabel 2.5 Efisiensi Kinerja Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Meningkatnya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penanganan Kejadian Kebakaran Dan Penanganan B3	Rp 576.995.344,00	Rp 79.800.000	13,83	100%	85,71%	85,71	71,88%
2	Meningkatnya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Ketersediaan Peralatan Proteksi Kebakaran Sesuai Standart	Rp 3.840.000,00	Rp 0	0	100%	100%	100	100%
3	Meningkatnya Investigasi	Persentase Investigasi	Rp 2.560.000,00	Rp 0	0	100%	50%	50	50%

	Kejadian Kebakaran	Kejadian Kebakaran							
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Rp 5.645.000,00	Rp 0	0	8,29%	40,48%	488,39	488,29%
5	Terlaksananya Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Penanganan Kasus Kondisi Membahayakan Manusia	Rp 3.600.000,00	Rp 600.000	16,67	100%	100%	100	83,33%

1. Sasaran: Meningkatnya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Anggaran pagu sesuai RKA dalam 1 tahun sebesar Rp 576.995.344,00 dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar Rp 79.800.000 sehingga capaian realisasi anggaran sebesar 13,83%
 - b. Target indikator kinerja Peresntase Penanganan Kejadian Kebakaran Dan Penanganan B3 selama 1 tahun sebesar 100%, dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebanyak 85,71% kasus sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 85,71%
 - c. Terjadinya efisiensi sebesar 71,88% Hal ini dikarenakan anggaran pada triwulan I belum terserap sepenuhnya, dan akan dilakukan penyerapan pada triwulan berikutnya.
2. Sasaran: Meningkatnya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
 - a. Anggaran pagu sesuai RKA dalam 1 tahun sebesar Rp 3.840.000,00 dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar Rp 0 sehingga capaian realisasi anggaran sebesar 0%
 - b. Target indikator kinerja Persentase Ketersediaan Peralatan Proteksi Kebakaran Sesuai Standart selama 1 tahun sebesar 100%, dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebanyak 100 % sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 100%
 - a. Terjadinya efisiensi sebesar 100% Hal ini dikarenakan anggaran untuk kegiatan inspeksi di triwulan I belum dapat terserap, namun kegiatan tetap berjalan dikarenakan adanya permintaan inspeksi dari pemilik bangunan gedung.
3. Sasaran: Meningkatnya Investigasi Kejadian Kebakaran
 - a. Anggaran pagu sesuai RKA dalam 1 tahun sebesar Rp 2.560.000,00, dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar Rp 0 sehingga capaian realisasi anggaran sebesar 0%
 - b. Target indikator kinerja Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran selama 1 tahun sebesar 100%, dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebanyak 50% sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 50%
 - c. Terjadinya efisiensi sebesar 50% Hal ini dikarenakan anggaran untuk kegiatan investigasi belum dapat terserap pada triwulan I. Namun,

kegiatan tetap dilakukan dikarenakan kebutuhan data untuk mencukupi laporan pemeriksaan pasca kebakaran.

4. Sasaran: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran
 - a. Anggaran pagu sesuai RKA dalam 1 tahun sebesar Rp 5.645.000,00, dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar Rp 0 sehingga capaian realisasi anggaran sebesar 0%
 - b. Target indikator kinerja persentase pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran selama 1 tahun sebesar 8,29%, dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebanyak 40,48% sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 488,39%
 - c. Terjadinya efisiensi sebesar 488,39% Hal ini dikarenakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam hal pembentukan redkar telah dilakukan sesuai dengan SK pembentukan Redkar di beberapa desa, sehingga telah terdapat beberapa desa yang sudah terbentuk redkar.
5. Sasaran: terlaksananya penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap ondisi membahayakan manusia
 - a. Anggaran pagu sesuai RKA dalam 1 tahun sebesar Rp 3.600.000,00, dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar Rp 600.000 sehingga capaian realisasi anggaran sebesar 16,67%
 - b. Target indikator kinerja Persentase Penanganan Kasus Kondisi Membahayakan Manusia selama 1 tahun sebesar 100%, dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebanyak 100% sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 100%
 - c. Terjadinya efisiensi sebesar 83,33% Hal ini dikarenakan anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan operasi pencarian belum dapat terserap sepenuhnya.

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

• ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

Analisis Penyebab Keberhasilan dari Target Sasaran Program/Kegiatan dan indikator kinerja yaitu

1. Tersedianya anggaran untuk penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran;
2. Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran;
3. Terjalannya koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat tentang penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran.

• ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

Permasalahan :

1. Belum adanya pos-pos unit WMK layanan Damkar dan Penyelamatan;
2. Kurangnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang sesuai dengan prosedur;
3. Masih kurangnya sumber air dalam penanggulangan bahaya kebakaran. Belum tersedianya Embung Air/Kolam sehingga akan menyulitkan pemadaman ketika membutuhkan suplai air;
4. Untuk Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) yaitu 15 menit sudah tiba di lokasi kebakaran, menghadapi beberapa kendala antara lain:
 - a. Adanya jalan yang rusak kecil, portal jalan yang rendah, akses jalan bergelombang dan banyak tikungan sehingga mobil pemadam tidak bisa melaju dengan maksimal dan dapat menyebabkan lambatnya penanganan kebakaran.
 - b. Masih banyak warga yang belum memahami situasi kebakaran sehingga menghalangi lalu lintas mobil Pemadam Kebakaran dan Informasi dari masyarakat yang terlambat disampaikan kepada petugas piket Damkarmat.
5. Masih minimnya anggaran belanja daerah untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang;
6. Belum terlaksananya pelatihan dan pembinaan terhadap Organisasi serta Masyarakat yang peduli api (Redkar) dikarenakan keterbatasan anggaran. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyediakan peralatan pemadam, seperti APAR, khususnya yang memiliki tempat usaha seperti Rumah Makan, hotel dan gedung layanan publik lainnya.

- **UPAYA/SOLUSI UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM MENCAPAI KINERJA**

1. Mengusulkan Pos Unit Layanan Damkar dan Penyelamatan di 4 (Empat) Wilayah Kerja Pemerintah Kabupaten Lumajang;
2. Mengusulkan hydrant kota yang memadai dalam penanggulangan bencana kebakaran di wilayah Kabupaten Lumajang;
3. Untuk mencapai Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) yaitu 15 menit sudah tiba di lokasi kebakaran, diperlukan adanya kesadaran dari masyarakat sekitar untuk tidak menghalangi mobil Pemadam Kebakaran saat terjadi Insiden Kebakaran, selain itu akses jalan yang baik juga sangat mendukung proses layanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Tersedianya Sistem Informasi yang memadai;
4. Mengusulkan anggaran belanja daerah yang cukup untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Redkar;
5. Melakukan sosialisasi penanggulangan bahaya kebakaran kepada masyarakat guna meminimalisir kerugian yang disebabkan bencana kebakaran.

2.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, adapun tindak lanjut yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala/permasalahan yang dihadapi tersebut setiap tahun dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana kebutuhan SDM dengan standar kualifikasi keahlian dan mengikuti diklat sesuai dengan tupoksi
2. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan satgas dengan langkah-langkah upaya sebagai berikut :
 - a. Pengembangan diklat dalam rangka mengaktifkan dan memotivasi pegawai baik secara berkala maupun berkelanjutan terhadap tupoksi masing-masing.
 - b. Penyempurnaan administrasi dan peningkatan kualitas data dan sistem informasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan, pelaporan kinerja dan hasil kerja harian terhadap bidang tugasnya masing-masing.
3. Peningkatan jumlah pengadaan sarana dan prasarana pelayanan sesuai kebutuhan dan standar kerja.

4. Pelaksanaan kerjasama dengan Dinas Pemadam dan Kebakaran Kabupaten tetangga.
5. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan mengaktifkan peran dan fungsi lembaga berbasis masyarakat dan instansi/Lembaga/dunia usaha peduli kebakaran,
6. Peningkatan inovasi infrastruktur kota dengan membuat lumbung/kantong air/drainase/kanal buka tutup pada titik rawan kebakaran.
7. Peningkatan kemampuan sumber daya anggaran selain APBD dengan mengupayakan Dana Dekon, DAK, DAU, Dana Tugas Pembantuan dan Dana NGO yang relevan dengan tugas pokok dan kewenangan urusan pemerintahan sub bidang damkar.

2.4 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

BAB III PENUTUP


LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2026 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Adapun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah manajemen kerja yang mulai tersusun rapi, kerja tim yang kompak dan rasa tanggung jawab yang dimiliki personil cukup tinggi. Demikian LKj Interim Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. LKj Interim ini sangat penting dan dapat digunakan sebagai media refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada publik (Masyarakat), selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 1 April 2026

Mengetahui,
Atasan langsung
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Dan
Penyelamatan



HINDAM ADRI ABADAN, S.IP
NIP. 198807122007011002



MOH. ASRO IENU ZARKASYI, S.Sos.MM
NIP. ~~19721102~~ 199403 1 006

LAMPIRAN

❖ DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MOH. ASRO IBNU ZARKASYI, S.Sos.MM**

Jabatan : Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HINDAM ADRI ABADAN, S.IP**

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 9 Januari 2026

Pihak Pertama

Pihak Kedua

HINDAM ADRI ABADAN, S.IP
NIP. 19880712 200701 1 002


MOH. ASRO IBNU ZARKASYI, S.Sos.MM
NIP. 19721102 199403 1 006

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Persentase peningkatan Penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	28,07%
2	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	71%

No.	Kegiatan	Anggaran Rp.	Keterangan
1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 576.995.344,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Rp 3.840.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	Investigasi Kejadian Kebakaran	Rp 2.560.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Rp 5.645.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Rp 3.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Total		Rp 592.640.344,00	


 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
HINDAM ADRI ABADAN, S.IP
 NIP. 19880712 200701 1 002

Lumajang, 9 Januari 2026
 Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

MOH. ASRO IBNU ZARKASYI, S.Sos.MM
 NIP. 19721102 199403 1 006

DOKUMENTASI KEGIATAN INSPEKSI



PT GEMA LESTARI INDONESIA



UD SAMA JAYA



YANTO 1 COTTAGE



KALININGRAD COTTAGE



YANTO 2 COTTAGE

DOKUMENTASI KEGIATAN SOSIALISASI

	
<p>GABUNGAN TK SENTUL & PETAHUNAN</p>	<p>TK/KB SINAR HARAPAN</p>
	
<p>TK NURUL ISLAM PASIRIAN</p>	<p>MTs DARUN NAJAH PETAHUNAN</p>
	
<p>YAYASAN AL FAUZAN</p>	<p>TK SUMBERSUKO GRATI</p>
	
<p>GABUNGAN TK & SDN SUMBERSUKO</p>	<p>SMP 3 LUMAJANG</p>



TK & SD AR RAHMAH KUNIR



RA IT AULIA SUKODONO



PT PLN



KB MIFTAHUL ULUM



TK ROSELLA BARU



KB & TK ISLAM KLAKAH



TK PLUS WAHIDIYAH



TK DHARMA WANITA KEDUNGAJANG



TK DARUL HUDA BORENG



SDN LABRUK KIDUL

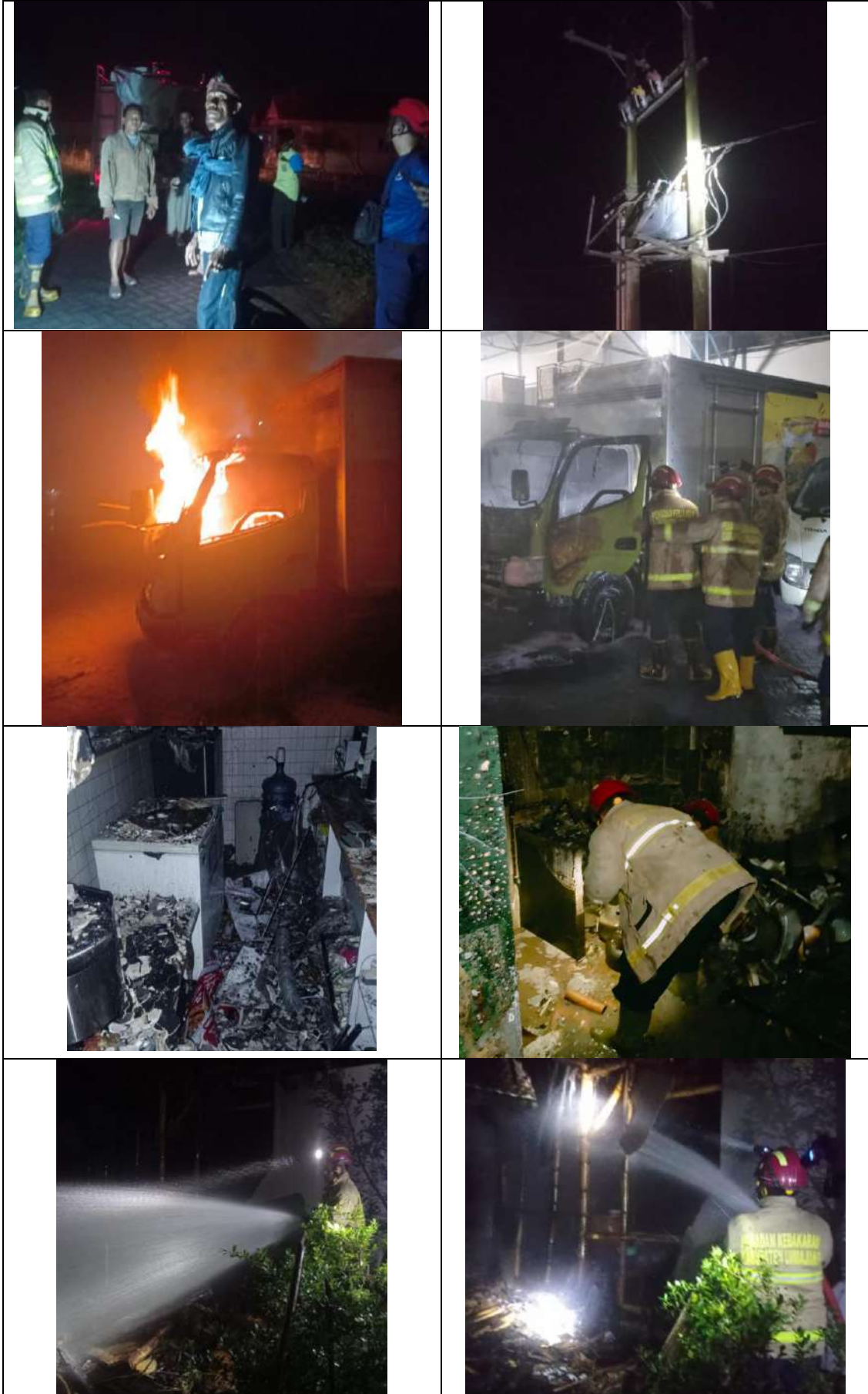


TK AR RAHMAH TUKUM



MI SALAFIYAH PANDANWANGI

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMADAMAN KEBAKARAN





DOKUMENTASI KEGIATAN PENANGANAN NON KEBAKARAN

